

Sosiologi Distribusi

Dr. Drajat Tri Kartono



PENDAHULUAN

Pada Modul 1 ini terlebih dahulu Saudara akan diperkenalkan dengan Sosiologi Distribusi yang merupakan cabang dari bidang ilmu Sosiologi Ekonomi. Teori-teori yang dipergunakan dalam Sosiologi Distribusi ini bersumber dari teori-teori Sosiologi dan teori-teori Ekonomi.

Pembahasan di dalamnya terbagi dalam dua kegiatan belajar. Dalam Kegiatan Belajar 1 akan dibahas tentang pokok-pokok pikiran dalam Sosiologi Ekonomi, kemudian dilanjutkan dengan batasan dan ruang lingkup Sosiologi Distribusi serta hubungan manusia dan masyarakat yang terkait dengan diperlakukannya sistem distribusi dalam masyarakat.

Sedangkan pada Kegiatan Belajar 2, pembahasan mengenai Sosiologi Distribusi akan diperdalam dengan mempelajari tentang pola-pola sistem distribusi masyarakat mulai meramu/berburu, pertanian sampai industri. Agar lebih mudah untuk mempelajari pembahasan mengenai sistem atau pola distribusi pada masing-masing tahapan masyarakat, maka dalam uraiannya nanti akan dibagi menjadi beberapa subbagian yang berisi beberapa materi penting yang perlu untuk dipahami.

Setelah menyelesaikan modul ini Saudara diharapkan dapat:

1. Menjelaskan Gambaran umum bidang studi Sosiologi Distribusi.
2. Menjelaskan Aspek-aspek yang dibahas dalam bidang studi Sosiologi Distribusi.
3. Menjelaskan asumsi dasar manusia dan masyarakat dan membedakan antara kepentingan keduanya.
4. Menjelaskan pola-pola sistem distribusi dalam masyarakat dan dinamika perubahannya.

KEGIATAN BELAJAR 1

Sosiologi Distribusi: Batasan dan Ruang Lingkup

Bidang ilmu Sosiologi merupakan suatu disiplin akademis yang mandiri, dan telah berusia sekitar 200 tahun. Istilah “Sosiologi” pertama kali diberikan oleh Auguste Comte, yang dipandang sebagai Bapak Sosiologi. Comte berpendapat bahwa bidang-bidang ilmu Sosiologi terbagi dalam dua bagian utama, yaitu statika sosial dan dinamika sosial, yang merupakan inti dalam pokok pembahasan Sosiologi. Dalam statika sosial, institusi utama atau kompleks institusi utama di dalam masyarakat, seperti perekonomian, keluarga atau politik dianggap sebagai satuan utama dalam analisis Sosiologi dan Sosiologi dianggap sebagai jalinan hubungan antara institusi-institusi tersebut.

Sedangkan dalam bagian dinamika sosial yang dititikberatkan adalah masyarakat secara keseluruhan sebagai suatu satuan analisis, dan harus memperlihatkan bagaimana masyarakat berkembang dan berubah dari masa ke masa. Dalam hal ini Comte merasa bahwa studi perbandingan masyarakat sebagai keseluruhan merupakan pokok pembahasan utama dalam analisis Sosiologi. Meskipun teori-teori Comte sudah lama tersisihkan, namun konsep-konsepnya yang umum mengenai Sosiologi sebagai studi ilmiah tentang struktur sosial atau fakta sosial masih merupakan pegangan dasar dalam perspektif Sosiologi.

Pembagian Sosiologi ke dalam sub-sub bidang, pertama kali dilakukan oleh Emile Durkheim, yang menamakan sebagai “bidang khusus” Sosiologi. Durkheim menyetujui gagasan bahwa Sosiologi harus menyibukkan diri dengan beraneka ragam institusi dan proses sosial. Ia menyatakan bahwa, “sebenarnya jumlah cabang Sosiologi, jumlah ilmu sosial khusus, sama banyaknya dengan jumlah fakta sosial yang beraneka ragam”.

Dalam ikhtisar yang dibuatnya untuk nomor awal majalah *L'anne Sociologique*, ia membagi majalah tersebut dalam tujuh bagian dengan banyak subbagian di setiap bagian utama, yang terdiri dari Sosiologi Umum, termasuk bagian mengenai kepribadian individu dan kolektivitas; Sosiologi Hukum dan Moral, termasuk bagian mengenai komunitas perkotaan dan pedesaan; dan Sosiologi Estetika.

Sosiologi Ekonomi berkembang sejalan dengan subbidang Sosiologi lainnya. Pada tahun 1950-an, para sosiolog Amerika Serikat mulai membuat suatu analisis yang sistematis mengenai fenomena ekonomi yang terjadi pada saat itu. Neil J. Smelser dan Talcott Parsons merupakan para sosiolog yang menjadi partisipan kuncinya, dengan buku mereka yang berjudul *Economy and Society*. Buku ini merupakan dasar pijakan bagi studi Sosiologi Ekonomi selanjutnya. Menurut Smelser, teori ekonomi merupakan bagian dari teori sistem sosial dan diperlukan suatu analisis yang melihat bagaimana tindakan ekonomi turut ambil bagian dalam konteks institusi ekonomi.

Institusi ekonomi atau lembaga ekonomi menjadi bagian penting dalam Sosiologi ekonomi baru. Kajian terhadap tatanan dan perubahan lembaga ini telah menjadi inti dari kajian-kajian Sosiologi. Dalam Sosiologi (maupun ekonomi) lembaga mempunyai fungsi mengatur, mengarahkan atau memberi konteks bagi tindakan individu di dalam kehidupan bersama kelompok atau masyarakat. Lembaga ini disebut lembaga sosial. Di dalam lembaga sosial terdapat beberapa jenis tindakan yang menjadi perhatiannya. Satu di antaranya adalah tindakan ekonomi.

Lembaga sosial yang berhubungan dengan tindakan ekonomi ini disebut dengan lembaga ekonomi. Henslin¹ mencatat ada sembilan lembaga sosial yang menjadi kajian Sosiologi, satu di antaranya adalah lembaga ekonomi. Oleh karena itu, menjadi tegas bahwa lembaga ekonomi adalah lembaga sosial yang berhubungan dengan tindakan ekonomi.

Pengkajian tentang kelembagaan dalam Sosiologi Ekonomi masih belum cukup pesat berkembang. Keadaan ini tercermin dari pernyataan Granovetter (1992; 16) "*Even if there exist a large number of fine sociological studies of economic institution, relatively little attention has been paid to the theoretical side or elaboration of notion of economic institution itself*".

Dalam khasanah literatur Sosiologi Ekonomi, pendekatan kelembagaan ini disebut dengan aliran Sosiologi Ekonomi Baru yang menjadi pendekatan alternatif dari empat pendekatan Sosiologi Ekonomi lainnya, yaitu: Sosiologi Pilihan Rasional, Sosio-Ekonomi, PSA-Ekonomi, dan Biaya Transaksi Ekonomi.² Aliran Sosiologi Ekonomi Baru ini berkembang sejak tahun 1980-

¹ James M. Henslin, *Essentials of Sociology: A Down Earth Approach* (Vol. II; Massachussets: Allyn and Bacon, 1998), hal.89.

² Damsar, *Sosiologi Ekonomi* (Jakarta, 1997), hal. 27-29.

an dengan melalui karya Granovetter³ tentang “*Economic Action and Social Structure: The Problems of Embeddedness*”, yang diterbitkan dalam *American Journal of Sociology* pada tahun 1985. Konsep inti dari aliran ini adalah *Embeddedness* yang berarti bahwa perilaku ekonomi tertambat pada jaringan-jaringan hubungan interpersonal. Tiga teori yang membentuk aliran baru ini adalah: Teori Jaringan, Sosiologi Kebudayaan, dan Teori Organisasi.

Teori Jaringan telah digunakan oleh Granovetter untuk menunjukkan bagaimana hubungan-hubungan koneksi dan struktur informasi mempengaruhi kemudahan memperoleh pekerjaan.⁴ Orang-orang yang terlibat dalam kontak yang tetap (ikatan kuat) cenderung sukar mendapatkan pekerjaan sedangkan orang yang terlibat dalam kontak yang tidak tetap atau *casual* (ikatan lemah) lebih mudah memperoleh pekerjaan.

Hal ini disebabkan ikatan yang kuat mendorong sukarnya akses anggota terhadap berbagai informasi yang ada, demikian pula sebaliknya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar usaha memperoleh pekerjaan dihasilkan dari informasi yang diperoleh dari keluarga atau teman dekat, daripada dari informasi/iklan pekerjaan yang resmi.

Teori Sosiologi Kebudayaan memberikan kontribusi penting dalam Sosiologi Ekonomi Baru melalui konsep *Cultural Embeddedness* di dalamnya, menurut Zukin dan DiMaggio⁵, kebudayaan mempengaruhi ekonomi melalui Kepercayaan dan Ideologi yang diterima begitu saja oleh anggota masyarakat. Penelitian empiris dalam teori ini terlihat dari hasil kajian Vivana Zilizer tentang *Moral and Markets* (1979), *Pricing the Priceless Child* (1985) dan *The Social Meaning of Money* (1994). Dalam ketiga studi ini, konsep yang penting dan langsung dipetik oleh Sosiologi Ekonomi Baru adalah konstruksi sosial atas fenomena ekonomi (asuransi sosial yang tidak mudah diterima karena hambatan kultural untuk memberikan nilai material terhadap kematian), nilai ekonomi anak yang berubah dari abad 19 ke-20, dan uang yang tidak netral (*multipier monier*).

Teori Organisasi memberikan masukan kepada aliran Sosiologi Ekonomi Baru melalui pemahaman bahwa organisasi selalu bergantung pada lingkungan, sebagai sumber dayanya. Hal ini berarti bahwa keterkaitan antara

³ Richard Swedberg, *New Economic Sociology: What has been Accomplished, What is Ahead?* (Acta Sociologica., Vol. 40, 1990).

⁴ Granovetter, *Getting A Job: A Study of Contacts and Careers* (Cambridge, 1974), hal. 123.

⁵ Zukin S. and DiMaggio P, *The structure of Capital* (Cambridge, 1990), hal. 1-36.

kemajuan dan penurunan kehidupan lembaga ekonomi dengan kehidupan lembaga di sekitarnya.

Konsep *Embeddedness* menunjuk pada proses ekonomi sebagai hasil hubungan antara tindakan ekonomi dengan struktur sosial. Konsep *embedded* sendiri diakui oleh Granovetter sebenarnya berasal dari ide antropolog ekonomi Karl Polanyi⁶ yang mengidentifikasi ekonomi sebagai proses yang terlembaga (*Economy, Then, is an instituted process*) atau yang dinyatakan bahwa: "*The human economy, then, is embedded and enmeshed in institutions, economic and noneconomic. The inclusion of noneconomic is vital. For religion or government may be as important for the structure and functioning of the economy as monetary institutions or the availability of tools and machines themselves that lighten the toil of labor*".⁷ Bagian penting dari penjelasan Karl Polanyi adalah pembedaannya antara ekonomi formal dan ekonomi substantif. Ekonomi kedua ini yang merupakan ekonomi kelembagaan.

Bila ditarik akar dari Sosiologi, perbedaan substantif dan formal sudah ada dalam karya Max Weber⁸ mengenai jenis rasionalitas dalam tindakan Ekonomi (*economic action*). Weber membedakan bahwa ekonomi formal hanya mengkaji tindakan ekonomi yang dapat diperhitungkan secara akuntansi (misalnya: hubungan antara tabungan dan produktivitas, penyediaan dan kebutuhan, dan sebagainya), sedangkan ekonomi substantif mengkaji aspek yang lebih sukar disederhanakan dengan perhitungan akuntansi karena ia menyangkut hubungan-hubungan tindakan ekonomi dengan faktor-faktor kemasyarakatan (seperti spirit agama, sistem nilai, dan sebagainya). Contoh kajian ekonomi substantif ini adalah karya Weber tentang kemajuan ekonomi kapitalisme di negara-negara tertentu yang dihubungkan dengan dengan etika Protestan.⁹

Struktur sosial adalah aspek statis yang memberikan kedudukan dan peran pada anggota kehidupan sosial sehingga aksi, interaksi, dan

⁶ Karl Polanyi, *The Economy as Instituted Precress* (1957), dari buku: Karl Polanyi, Conrad M. Arensberg, Harry W. Pearson, *Trade Market in The Early Empires* (Renewed, 1985), hal 35.

⁷ *Ibid*, hal.34.

⁸ Max Weber, *Economy and Society* (part I; New York, 1968), hal. 85-90.

⁹ Max Weber, *The Protestant Ethnic and the Spirit of Capitalism* (Scribner, New York, 1985).

interkoneksi dapat terjadi, dimengerti, dan terantisipasi. Struktur sosial memungkinkan kehidupan sosial terjadi. Bagaikan manusia, maka ia sudah berbentuk tubuh yang utuh dapat bergerak dan hidup. Akan tetapi hidup saja tidak cukup, masyarakat punya tujuan dan harapan yang akan dicapai. Bagian ini merupakan komponen kedua dari kebudayaan, yaitu subsistem fungsi sosial yang berguna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Salah satu kebutuhan tersebut adalah kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi ini menjadi isi dari subsistem struktural. Bagaikan tubuh yang hidup ia punya fungsi yang terlihat dari niat, cita-cita, rencana di pikiran untuk diwujudkan dalam kehidupannya.

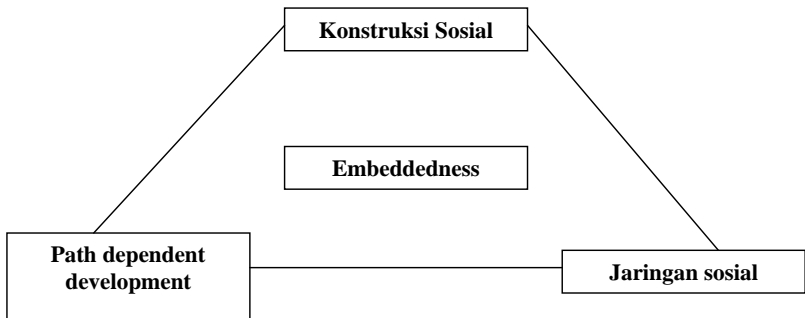
Demikian juga subsistem fungsi selalu menyatu dengan subsistem struktural karena mereka berasal dari satu sumber: kebudayaan. Bentuk konkret dari subsistem struktural misalnya adalah lembaga kekerabatan atau lembaga keluarga, persekutuan, dan pertemanan. Di dalam kehidupan kekerabatan dan keluarga, terdapat lembaga ekonomi, seperti hak pemilikan, pembagian pekerjaan, pertukaran, kontrak dan pasar. Tindakan-tindakan ekonomi individu, oleh karenanya tidak sepenuhnya independen dan ekspresif, akan tetapi berada atau tertambat (*embedded*) dalam konteks aturan yang berlaku dalam subsistem struktural, fungsional, dan kebudayaan yang termanifestasi dalam hubungan sosial sehari-hari. Seperti menyatunya cita-cita dan badan yang hidup, inilah gambaran *embeddedness*.

Sumbangan penting dari Granovetter dalam analisa konsep *embeddedness* adalah cara dan temuannya mengenai variasi dalam tingkat *embeddedness* di beberapa masyarakat. Melalui penerapan analisa jaringan ia menemukan bahwa tindakan ekonomi mempunyai tingkat *embeddedness* dari yang sangat kuat (*highly*), *moderate*, sampai ke yang tidak berakar sama sekali (*dis embeddedness*). Berkurangnya tingkat *embeddedness* tidak berarti bahwa tindakan ekonomi menjadi tertutup tetapi justru menunjukkan pola-pola *embeddedness* yang berbeda-beda. Inilah yang harus ditemukan oleh para sosiolog.

Dalam menganalisa fenomena migrasi tenaga kerja manca Negara sebagai lembaga dengan pendekatan holistik atau melibatkan secara menyeluruh lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat beserta instrumen-instrumen pendukungnya. Sehingga pada tataran ini, Sosiologi Ekonomi mengembangkan lima konsep penting untuk diperhatikan baik di daerah asal maupun di daerah tujuan. Konsep pokok dari kelimanya adalah (1) *Embeddedness* (ketertambatan) dan *Degree of Embeddedness* (tingkat

ketertambatan). Dalam konsep ini terkandung penjelasan tentang konsep (2) Konstruksi sosial terhadap lembaga ekonomi, (3) Jaringan sosial, (4) *Path-dependency* (keterkaitan lembaga). Konsep lain yang penting dalam pembahasan adalah (5) Modal sosial.

Konsep pertama, tentang *Embeddedness* dimaksudkan sebagai ketertambatan tindakan ekonomi pada sistem sosial (dan kebudayaan). Model analisa kelembagaan Granovetter membangun paradigma baru dalam Sosiologi ekonomi kelembagaan dengan tiga substansi: (1) Konsep sosial *construction of reality* (2) *Social network* (3) *Path-dependent development*. Setiap konsep ini memberikan konsekuensi metodologis terhadap kajian tentang lembaga.



Pertama, Konsep Sosial *Construction of Reality* memberikan pandangan bahwa lembaga bukanlah sesuatu yang bersifat objektif atau realitas eksternal sebagaimana pengertian Durkheim dengan fakta sosial, akan tetapi ia lebih merupakan hasil pembentukan sosial secara perlahan (*a slow social creation*). Bermula dari satu cara melakukan pekerjaan, kemudian menjadi lebih sering dan teratur dan akhirnya menjadi aturan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Bila suatu lembaga sudah terbentuk maka orang mengorientasikan tindakannya pada pola-pola yang ada. Keadaan ini secara baik diungkapkan oleh Horton¹⁰ “Lembaga selalu merupakan sistem gagasan dan perilaku yang terorganisasi yang ikut dalam perilaku itu. Lembaga tidak mempunyai anggota tetapi mempunyai pengikut". Perbedaan antara anggota dan pengikut ini menggambarkan adanya batas halus jarak antara lembaga dan individu, sehingga memberi ciri lembaga yang tidak sepenuhnya eksternal dan objektif.

¹⁰ Paul B Horton, *Sosiologi* (Jakarta, 1991), hal 79.

Konstruksi sosial terhadap lembaga tidaklah statis atau sekali dibentuk jadi selamanya. Konstruksi merupakan proses yang terus-menerus. Proses konstruksi, bisa diikuti oleh rekonstruksi atau bahkan dekonstruksi.

Kedua, *network* menunjukkan jaringan mobilisasi sumber-sumber yang dapat dihadirkan oleh suatu lembaga. Substansi ini menunjukkan bahwa tidak semua konstruksi lembaga yang dihasilkan oleh individu menjadi realitas sosial kecuali konstruksi unggul yang mampu menghadapi tekanan-tekanan dari perkembangan sosial, ekonomi, sejarah dan politik yang telah ada sebelumnya. Keunggulan ini dapat terjadi apabila suatu lembaga didukung oleh jaringan orang yang menurut Granovetter disebut *The Great Man*. Akan tetapi hal yang penting dalam *network* bukanlah orangnya akan tetapi jaringan orang-orang tersebut dan kemampuan interaksinya dengan struktur sosial yang mendukungnya.

Ketiga, *Path-dependent* menunjukkan suatu kondisi di mana lembaga-lembaga yang terbangun tidak dapat terlepas dari keterkaitan (dan pengaruh) dari (lingkungan) lembaga lain di sekitarnya yang sudah ada terlebih dahulu. Keterkaitan ini terjadi karena lembaga yang ada telah menjadi pegangan bertindak anggota masyarakat, sehingga perubahan terhadapnya menuntut perubahan yang mendasar dalam konstruksi sosial masyarakat dan jaringan sosial pendukungnya.



Sumber: www.google.co.id / vibiznews.com

Gambar 1.1
Pasar dan Tempat Transaksi Penjual Dan Pembeli

Akhir-akhir ini marak bisnis online yang dipilih sebagai alternatif berbelanja. Baik pembeli maupun penjual melakukan transaksi di dunia maya dan kemudian barang beserta uang sebagai bentuk riil transaksi telah terwujud dengan sendirinya. Dibutuhkan saling kepercayaan yang tinggi antara kedua belah pihak.

Bagaimana Saudara mengkaitkan fenomena ini, hubungan pembeli dan penjual dari pasar langsung vs pasar online, dikaitkan dengan Sosiologi Ekonomi yang Saudara pelajari di atas.

Perubahan-perubahan kelembagaan terjadi ketika ada mobilisasi sumber-sumber melalui jaringan untuk mengatasi hambatan perubahan tersebut. Hubungan konflik dapat terjadi dalam keadaan ini, namun konflik tidak mengarah ke integrasi tetapi suatu tahap dari proses konstruksi yang baru. Cara pandang konflik ini dapat ditarik dari pemikiran Cooley¹¹ yang mengatakan:

"The more one think of it the more he will see that conflict and cooperation are not separable things, but phase of one process which always involves something of both you can resolve the social order into a great number of cooperative wholes of various sorts, each of which contains conflicting elements within itself which it is imposing some sort of harmony with a view to conflict with others".

Cara pandang dependensi antar lembaga, pernah dikemukakan oleh Feibleman, dengan konsep *Relation between Institutions*, di mana di dalamnya terjadi interaksi, konflik, dan harmoni di antara institusi yang saling berhubungan. Di dalam konflik antar institusi dapat berbentuk pelanggaran (*infringement*), kompetisi, distorsi, perebutan (*upsurbtion*)¹².

Konsekuensi metode dari pemahaman tersebut adalah perlunya konteks dan perkembangan lembaga yang telah ada di sekitar lembaga yang diteliti. Hal ini akan menjelaskan jaringan dan sumber-sumber yang mendukung, membentuk dan menekan mobilisasi perkembangan suatu lembaga di antara lembaga-lembaga lain di sekitarnya. Kajian terhadap suatu lembaga akan

¹¹ Charles H. Cooley, "Social Process", *Master of Sociological Thought Ideas In Historical and Context* (New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc., Co., 1977), hal. 312.

¹² James K. Feibleman, *The Institution of Society*, (New York, 1968), hal. 245-261.

menyangkut jaringan fungsi-fungsi lembaga lain yang saling menunjang dan jaringan lembaga lain yang tidak sefungsi. Perbandingan antara jaringan-jaringan lembaga akan menunjukkan sifat kelenturan dan kekerasan lembaga terhadap perubahan.

Dalam Sosiologi Ekonomi, yang menjadi pusat perhatian adalah pada analisis mengenai bagaimana proses-proses produksi, distribusi dan konsumsi dilaksanakan dalam konteks pokok pembahasan yang khas dalam Sosiologi, yaitu masyarakat, institusi dan hubungan sosial. Dalam mempelajari masyarakat, Sosiologi Ekonomi dapat merupakan suatu disiplin khusus yang menetapkan masyarakat sebagai satuan analisisnya. Dengan demikian tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana di dalam berbagai macam sistem sosial, institusi-institusi yang membentuk suatu masyarakat berkaitan satu dengan yang lainnya. Namun demikian, ada pula suatu cabang ilmu pengetahuan yang dipusatkan pada masyarakat sebagai satuan analisis. Coba Saudara pelajari petikan dari Modul Sosiologi Ekonomi berikut, agar Saudara mengenal benar Sosiologi Ekonomi.

Kutipan: Modul Sosiologi Konsumsi

SOSIOLOGI EKONOMI

Dalam studi Sosiologi ekonomi, ekonomi dianggap sebagai salah satu subsistem sosial. Hal ini berarti ekonomi merupakan suatu permasalahan yang tidak hanya menyangkut ekonomi sebagai satu kesatuan saja tetapi juga sangat berkaitan erat dengan institusi-institusi yang terdapat dalam masyarakat seperti agama, politik, pemerintahan atau budaya. Dengan demikian ekonomi sebagai subsistem sosial harus mempertimbangkan institusi-institusi masyarakat lainnya yang dapat memperlancar atau menghambat kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh aktor-aktor ekonomi. Oleh karenanya setiap saat terdapat permasalahan-permasalahan ekonomi yang menyangkut pada tingkatan individu, masyarakat bahkan suatu negara maupun internasional tidak dapat hanya sebatas melihat persoalan ekonomi saja tetapi juga menghubungkannya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti Sosiologi, politik, antropologi maupun psikologi. Dengan demikian permasalahan-permasalahan ekonomi tersebut dapat dipahami walaupun seringkali dalam pemahaman tersebut terdapat suatu kondisi tumpang tindih antara fokus perhatian ekonomi dan fokus perhatian ilmu sosial lainnya (Damsar:1997).

Pembaharuan kedua fokus perhatian dari Sosiologi dan Ilmu Ekonomi tersebut sebenarnya telah lama menjadi pembahasan para ahli yang bersangkutan. Max Weber sebagai seorang sosiolog yang selanjutnya juga dikenal seorang ekonom memberikan garis batasnya dengan menekankan bahwa Sosiologi ekonomi memperhatikan tindakan ekonomi sejauh ia memiliki dimensi sosial dan selalu melibatkan makna serta berhubungan dengan kekuasaan (Damsar:1997).

Sedangkan dari pihak ekonomi, Joseph Schumpeter yang kemudian dipandang sebagai seorang sosiolog yang membuat pembagian kerja di antara kedua bidang ilmu tersebut dengan memberi batasan bahwa Sosiologi Ekonomi berkaitan dengan konteks institusional dari ekonomi sedangkan ilmu ekonomi berkaitan dengan ekonomi sendiri.

Masalah perbatasan antara kedua disiplin ilmu ini kemudian dirangkum oleh Richard Swedberg melalui bukunya *Economic and Sociology; Redefining their Boundaries: Conversation with Economists and Sociology* (1992). Swedberg selanjutnya berhasil menyimpulkan bahwa terdapat tiga kecenderungan pembagian kerja antara ekonom dan sosiolog (baca:Damsar,1995:6), yaitu:

1. Kecenderungan bahwa para ekonom memperluas bidang kajiannya pada topik yang secara tradisi digeluti oleh para sosiolog.
2. Kecenderungan bahwa para sosiolog memperluas bidang kajiannya pada masalah yang sama seperti yang dikaji oleh ekonom. Masalah tersebut merupakan topik yang menjadi tradisi kajian ekonom.
3. Kecenderungan munculnya perpaduan baru antara ekonomi dan Sosiologi.

Sosiologi ekonomi adalah aplikasi dari kerangka referensi umum, variabel-variabel, dan model-model penjelasan dari Sosiologi terhadap aktivitas-aktivitas yang kompleks mengenai produksi, distribusi, perdagangan dan konsumsi dari barang-barang langka dan jasa-jasa (Smelser,19870). Dalam hal ini Sosiologi Ekonomi dapat dijelaskan secara lebih lanjut sebagai suatu studi mengenai bagaimana cara individu atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya terhadap jasa dan barang langka dengan menggunakan pendekatan Sosiologi (Damsar,1997:9).

LANJUTAN...SOSIOLOGI EKONOMI

Sosiologi Ekonomi adalah studi yang berhubungan dengan dua hal, yaitu:

1. Fenomena Ekonomi yaitu gejala bagaimana individu atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang langka. Hal ini sangat berkaitan dengan setiap aktivitas individu maupun masyarakat yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi jasa-jasa dan barang-barang langka. Fenomena ekonomi yang berkenaan dengan permasalahan tersebut dirangkum oleh Holton (1992:7), yaitu; konsumsi dan produksi; produktivitas dan inovasi teknologi; pasar; kontrak; uang; tabungan; organisasi ekonomi (seperti bank, koperasi); kehidupan dalam tempat kerja; pembagian kerja dan segregasi pekerjaan; kelas ekonomi; ekonomi internasional; ekonomi dan masyarakat luas; dampak dari fokus-fokus gender dan etnik terhadap ekonomi; kekuatan ekonomi; dan ideologi ekonomi.
2. Pendekatan Sosiologis yaitu berupa kerangka acuan, variabel-variabel dan model-model yang digunakan sosiolog dalam memahami dan menjelaskan kenyataan sosial atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan semacam ini merupakan suatu metode untuk menganalisis dan memahami fenomena ekonomi yang berbeda dengan yang digunakan oleh para ekonom. Dalam hal ini Weber menekankan agar sosiolog harus bebas nilai dalam menjelaskan realitas sosial.

Fokus Sosiologi Ekonomi

Max Weber, seorang sosiolog, menekankan bahwa Sosiologi ekonomi memperhatikan tindakan ekonomi sejauh ia mempunyai dimensi sosial dan selalu melibatkan makna serta hubungan dengan kekuasaan. Joseph Schumpeter, ekonom, membuat pembagian kerja di antara dua ilmu tersebut dengan memberi batasan bahwa Sosiologi ekonomi berkaitan dengan konteks institusional dari ekonomi itu sendiri. Berdasarkan pandangan dua ahli ini, fokus analisis untuk Sosiologi ekonomi adalah pada kegiatan ekonomi, dan mengenai hubungan antara variabel-variabel Sosiologi yang terlihat dalam konteks non-ekonomis.

Pada kegiatan ekonomi, Sosiologi Ekonomi menganalisis proses-proses ekonomi, misalnya proses pembentukan harga antara pelaku ekonomi, bagaimana kegiatan ekonomi tersebut dilegitimasi dalam peranan-peranan dan kolektivitas, dengan nilai-nilai, norma dan sanksi yang seperti apa kegiatan ekonomi tersebut dijalankan.

Dalam hubungan antara variabel-variabel Sosiologi yang terlihat dalam konteks non ekonomi, Sosiologi ekonomi menganalisis hubungan dan interaksi antara ekonomi dan institusi lain dari masyarakat, contohnya hubungan antar ekonomi dan keluarga (bagaimana peranan-peranan dalam keluarga mempertahankan kehidupan ekonomi rumah tangga) juga menganalisis perubahan institusi dan parameter budaya yang menjadi konteks bagi landasan ekonomi dari masyarakat.

Institusi-institusi sosial, misalnya keluarga, gereja, sekolah, dan partai politik, merupakan pokok pembahasan yang khas dari Sosiologi. Masalah-masalah yang dapat dijadikan analisis dalam Sosiologi Ekonomi, misalnya adalah sebagai berikut: kesamaan ciri apakah yang dijumpai pada institusi ekonomi dalam setiap masyarakat? Dalam dimensi apa sajakah mereka dapat dibeda-bedakan, dan bagaimanakah dimensi tersebut berbeda manakala kita membandingkan institusi-institusi yang menjalankan fungsi yang berlainan?

Pokok pembahasan yang ketiga, adalah aspek hubungan sosial. Weber mendukung gagasan bahwa Sosiologi terutama dapat merupakan suatu studi mengenai hubungan dan tindakan sosial, dan mengembangkan seperangkat kategori untuk melakukan deskripsi dan analisis terhadapnya. Dalam Sosiologi Ekonomi, masalah yang dapat dijadikan pokok pembahasan, misalnya: hubungan antara status sosial ekonomi masyarakat dengan daya beli barang-barang konsumsi, (seperti: makanan, pakaian, rumah, kendaraan dan sebagainya yang digunakan sendiri).

Kutipan: Modul Sosiologi Konsumsi

Konsumsi Sebagai pokok bahasan Sosiologi Ekonomi

Secara umum, Konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan atau tindakan mempergunakan komoditas baik yang berupa barang atau jasa, untuk memenuhi keinginan (Lipsey,1990:958). Jika ditelusuri dari asal usulnya; kata konsumsi itu berasal dari kata bahasa Latin *consumere* (*consum mere*) dan *consumare* (*cum summa*). Sebagaimana dikutip oleh Barnhart (1988) dan Williams (1982), *consumere* mempergunakan seluruhnya, dalam arti sampai habis. Sedangkan *consummare* diartikan sebagai menjumlah atau menambah atau membuat lengkap. Ambivalen? Ya. Di satu pihak, kegiatan konsumsi itu bersifat destruktif, yaitu menghabiskan, sedang di pihak lain kegiatan konsumsi adalah konstruksi. Pati Falk (1994) menguraikan bahwa secara sederhana dan universal, konsumsi adalah sintesis dari proses *entropic* dan *negentropic* dalam kehidupan manusia, yaitu sintesa atas atas proses melarutkan garam atau zat (*matter*) ke dalam energi atau untuk menciptakan energi dan proses merawat dan membuat bentuk-bentuk yang lebih kompleks dan teratur atas zat atau barang-barang itu. Jadi, kegiatan konsumsi adalah rantai transformasi yang tidak berkesudahan dari proses produksi dan konsumsi.

Dalam Sosiologi, dipelajari tentang faktor-faktor non ekonomi yang mempengaruhi konsumsi, misalnya gengsi, pertemanan, *trend* dan sebagainya. Hal ini, tercermin dalam kenyataan bahwa kita tidak selalu mengkonsumsi sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia dan kebutuhan yang dihadapi. Cobalah Saudara temukan realitas seperti ini dalam kehidupan sehari-hari. Dapatkah Saudara menjelaskan faktor-faktor diluar gaji dan kebutuhan sehari-hari yang mempengaruhi konsumsi. Coba Saudara lakukan pengkajian dengan memperbandingkan ini pada semua tingkatan usia dan status sosial-ekonomi. Coba Saudara perhatikan bagaimana anak-anak SMP dan SMA berbelanja di *mall*. Juga perhatikan orang-orang dewasa yang belum berkeluarga dan yang sudah berkeluarga berbelanja.

Kutipan: Modul Sosiologi Produksi

Produksi sebagai Pokok Bahasan Sosiologi Ekonomi

Proses produksi adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh hampir setiap orang. Yang menarik bagi Sosiologi dari kegiatan produktif ini adalah bahwa kegiatan produktif selalu dan akan selalu melibatkan banyak orang. Meskipun bisa saja orang melakukan kegiatan produktif itu sendirian, tetapi hasilnya dapat ditujukan kepada orang lain; untuk dipertukarkan dengan sesuatu dengan orang lain; dan yang lebih lazim adalah untuk dijual kepada orang lain. Kenyataannya lebih dari itu. Mulai dari mengumpulkan informasi, inspirasi, pengetahuan dan bahan-bahan yang akan diproduksi, lalu kegiatan pengolahan atau pembuatan (termasuk pelayanan-pelayanan yang harus diikutsertakan), promosi dan kemudian pemasarannya, pelaku produksi akan berinteraksi dengan orang lain.

Pada saat mengumpulkan informasi mengenai apa yang harus diproduksi dan teknologi apa yang diperlukan, pelaku produksi akan berinteraksi dengan produsen informasi atau penyalur informasi. Ia akan membaca surat kabar atau majalah yang relevan, bertanya kepada para penyuluh, mendengarkan siaran radio, dan kalau perlu dia akan ke perpustakaan untuk mempelajari hasil-hasil penelitian tentang perilaku pasar dan perilaku konsumen untuk produk tersebut.

Interaksi berikutnya adalah dengan pemilik bahan-bahan produksi atau para penyalur bahan produksi. Kegiatan untuk memperoleh bahan-bahan ini kadang-kadang dapat dilakukan dengan mudah, tetapi sering kali juga harus menghadapi persoalan-persoalan seperti kelangkaan bahan yang diakibatkan baik oleh keadaan alam atau keadaan pasar yang penuh persaingan.

Interaksi selanjutnya adalah pada saat pemrosesan bahan-bahan tersebut menjadi produk yang siap disalurkan. Di sini akan terlihat adanya bermacam-macam status dan peranan pada para pelaku produksi. Ada pemilik modal, pegawai atau karyawan, atau buruh. Dalam derajat tertentu interaksi diantara para pelaku produksi ini sudah melibatkan pihak-pihak luar seperti serikat pengusaha, serikat pekerja, atau serikat buruh, dan pemerintah.

Interaksi sosial pada kegiatan produksi itulah yang menjadi fokus perhatian Sosiologi Produksi. Sebagaimana kita ketahui, interaksi sosial antara lain dapat berbentuk pertukaran, kerjasama, dan persaingan. Oleh karena itu Sosiologi Produksi atau tinjauan Sosiologi terhadap kegiatan produksi mencoba membahas interaksi sosial yang meliputi aspek-aspek pertukaran kerjasama dan persaingan dalam kegiatan produksi. Di samping itu juga mengetahui faktor-faktor Sosiologis yang mempengaruhi produksi.

Selain bidang-bidang kajian yang telah disebutkan di atas, ada satu lagi bidang kajian yang dipelajari Sosiologi, yaitu studi tentang distribusi. Walaupun nama Sosiologi Distribusi belum pernah dikemukakan secara eksplisit, namun substansi kajiannya telah berkembang lama, seperti stratifikasi sosial, ketimpangan dan sebagainya.

Sosiologi Distribusi berkaitan erat dengan bidang kajian Sosiologi Ekonomi, dalam hal sumber teorinya di mana teori yang dipergunakan dalam Sosiologi Distribusi adalah teori-teori Sosiologi dan teori-teori Ekonomi. Walaupun kedua ilmu tersebut, berhubungan dalam hal menerangkan masalah distribusi namun, terdapat batas-batas yang perlu dipertegas.

Perlu kami ingatkan bahwa dalam Sosiologi Ekonomi yang dipelajari adalah proses-proses produksi, distribusi dan konsumsi dalam konteks hubungan dengan masyarakat, institusi dan hubungan sosial, sedangkan 'Sosiologi Distribusi memusatkan perhatian pada proses alokasi "barang" yang bernilai langka dalam masyarakat'. Maka, dalam kerangka pembahasan mengenai masyarakat, Sosiologi Distribusi membahas bagaimana proses distribusi terjadi dalam kerangka struktur masyarakat.

Proses distribusi merupakan proses alokasi "sesuatu" yang bernilai langka baik yang dilakukan melalui pertukaran sosial maupun melalui pasar. "Sesuatu" yang dimaksud di sini menurut kajian ekonomi adalah uang, sedangkan menurut kajian Sosiologi adalah *prestige*. Pada dasarnya kedua ilmu ini, memiliki kesamaan pengertian bahwa segala hal yang didistribusikan adalah sesuatu yang memiliki nilai atau berharga.

Berdasarkan pemahaman ini maka, sesuatu yang didistribusikan tersebut dapat berupa uang, *prestige*, modal informasi, kekuasaan, pengetahuan, sumber-sumber alam, teknologi atau bahkan saluran air. Hal-hal berharga ini sangat tergantung pada konteks masyarakat tertentu, dalam arti bahwa masyarakat memberikan makna atau definisinya sendiri pada sesuatu hal, apakah hal itu dinilai berharga atau tidak.

Pemberian makna terhadap sesuatu hal terjadi melalui suatu proses yang panjang. Banyak faktor berpengaruh terhadap proses pemberian makna tersebut, misalnya faktor kebudayaan dominan, faktor sejarah, faktor kondisi ekonomi masyarakat setempat, dan sebagainya.

Analisis Sosiologi Distribusi dititikberatkan pada aspek dinamis dari masalah struktural masyarakat. Satu postulat yang penting yang digunakan dalam bidang studi Sosiologi Distribusi adalah hampir semua hasil tenaga kerja manusia didistribusikan pada dua basis yang pada prinsipnya saling berlawanan, yaitu *kebutuhan* dan *kekuasaan*.

Dalam diskusi mengenai hakikat manusia, dinyatakan bahwa tindakan manusia kebanyakan didorong oleh kepentingannya sendiri atau oleh kepentingan kelompok. Hal ini memberi kesan bahwa kekuasaan sendiri menentukan distribusi penghargaan (*reward*). Pernyataan ini tidak dapat berlaku jika kita juga menyatakan bahwa kebanyakan dari kepentingan mendasar manusia hanya dapat dipuaskan oleh berlangsungnya hubungan kerja sama antara satu orang dengan lainnya. Kerja sama merupakan hal yang mendasar baik untuk bertahan hidup, maupun untuk mempertahankan tujuan-tujuan yang lain. Dengan kata lain, kepentingan diri manusia memaksa mereka untuk tetap menjadi anggota masyarakat dan untuk membagikan tenaga kerja mereka.

Dengan demikian, manusia akan membagikan hasil tenaga mereka dengan tujuan untuk mempertahankan hidup dan melangsungkan produktivitasnya. Tindakan yang mereka lakukan ini merupakan sesuatu yang penting atau harus dilakukan atau merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka sendiri. Inilah yang merupakan hukum distribusi yang pertama.

Hukum yang kedua berbicara mengenai bagaimana cara agar “kelebihan” (*surplus*), misalnya barang dan jasa melampaui kebutuhan minimum agar produsen tetap hidup dan produktif, di mana orang yang mampu berproduksi lah yang akan didistribusikan. Hal ini menunjukkan hubungan yang penting antara dua variabel utama, yaitu kekuasaan dan *privilege* (*privilege*). Jika *privilege* diartikan sebagai kepemilikan atau kontrol

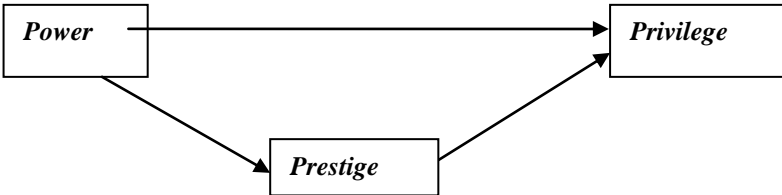
terhadap surplus yang dihasilkan suatu masyarakat maka dapat diartikan secara luas bahwa *privilege* adalah merupakan fungsi dari *altruisme*. Hal ini berarti bahwa untuk menjelaskan sebagian besar distribusi *privilege* dalam masyarakat, kita harus menentukan distribusi kekuasaannya terlebih dahulu.

Kita dapat menyatakan bahwa tugas menjelaskan distribusi *privilege* adalah sederhana. Namun, hal tersebut tidak berlaku karena ada berbagai bentuk kekuasaan yang berasal dari berbagai macam sumber. Selain itu, penggunaan hubungan kunci akan berakibat berkurangnya masalah pada proporsi yang dapat diatur, karena yang menjadi fokus adalah satu variabel kunci, yaitu kekuasaan. Jadi jika kita dapat menentukan pola distribusi dari suatu masyarakat, secara luas kita juga dapat menentukan pola distribusi *privilege* dan kita juga dapat menemukan sebab-sebab mengapa distribusi *privilege* berhubungan dengannya.

Untuk mencari jawaban permasalahan ini perlu dipertanyakan lebih dahulu bagaimana elemen dasar yang ketiga dari semua sistem distribusi, yaitu *prestige*, berhubungan dengan kekuasaan dan *privilege*. Dapat dikatakan bahwa *prestige* adalah fungsi dan *privilege*, tetapi yang paling baik adalah jika kita menyatakan bahwa *prestige* secara luas merupakan fungsi dari kekuasaan dan *privilege*, setidaknya dalam masyarakat di mana terdapat surplus yang substansial. Jika hal ini benar maka, walaupun subjek *prestige* tidak selalu disebutkan dalam kondisi ini, pola distribusinya dan sebab-sebabnya dapat dideduksi dari diskusi tentang distribusi kekuasaan dan *privilege* dan penyebabnya dalam masyarakat di mana terdapat surplus tertentu.

Hipotesis pertama, menyatakan bahwa dalam masyarakat yang paling sederhana, atau yang teknologinya paling primitif, barang dan jasa yang tersedia akan didistribusikan seluruhnya atau sebagian berdasarkan kebutuhan. Seiring dengan meningkatnya produktivitas masyarakat, kemungkinan untuk memproduksi surplus juga meningkat. Walaupun demikian, harus dicatat bahwa keberadaan surplus bukan merupakan fungsi dari kemajuan teknologi saja. Karenanya hipotesis kedua, adalah bahwa dengan kemajuan teknologi, proporsi barang dan jasa yang meningkat yang tersedia dalam masyarakat akan didistribusikan pada dasar kekuasaan.

Dalam Uraian selanjutnya dalam modul ini, Saudara akan terus lebih memperhatikan hubungan tiga variabel penting dalam Sosiologi distribusi, yaitu: *Power* (kekuasaan), *Prestige* (prestis atau kedudukan/ penghargaan sosial), dan *Privilege* (hak pemilikan istimewa). Hubungan ketiga variabel tersebut adalah



Privilege atau hak (pemilikan) istimewa seseorang adalah dia mendapatkan atau diberi alokasi barang dan jasa lebih banyak dari yang lain, seperti gaji lebih besar atau boleh memakai mobil dinas gratis. Hak *privilege* tersebut di atas, secara Sosiologis, dapat diperoleh orang karena mereka mempunyai kekuasaan yang lebih dari yang lain seperti mendudukkan jabatan tertentu. Atau juga karena dia dihargai dan didudukkan masyarakat secara terhormat, seperti ditokohkan oleh masyarakat sebagai pemimpin organisasi agama atau tokoh masyarakat.

Coba Saudara pikirkan dan temukan di keluarga atau di lingkungan hidup Saudara orang-orang yang mendapatkan hak istimewa (*privilege*) dan kenapa orang tersebut bisa mendapatkan hak tersebut.

Sejauh ini kita telah mempelajari hipotesis-hipotesis yang digunakan dalam analisis Sosiologi Distribusi. Namun, sebagaimana studi-studi Sosiologi yang lain, studi tentang Sosiologi Distribusi menggunakan metode ilmiah dalam usaha memberi penjelasan mengenai fakta sosial. Hal ini telah ditetapkan sejak awal berkembangnya Sosiologi, di mana Comte membuat suatu komitmen yang kuat terhadap metode ilmiah. Metode ini harus diterapkan untuk menemukan hukum-hukum alam yang mengatur gejala-gejala sosial.

Secara umum metode ilmiah memuat unsur variabel-variabel dan hubungan antar variabel tersebut. Dalam Sosiologi, untuk menentukan variabel dan hubungan-hubungannya lebih sulit daripada dalam ilmu ekonomi. Para ahli Sosiologi memiliki beragam pendapat mengenai masalah dan konsep mendasar dari disiplin mereka. Hal ini menyebabkan munculnya banyak variabel-variabel dan teori-teori. Karena terlalu banyaknya variabel

dan teori itu, para sosiolog jarang ada yang sanggup menyajikan model-model yang sederhana dan koheren; sebaliknya, analisis mereka sering kali berfokus pada kategorisasi fakta-fakta sosial. Karakterisasi analitis kita mengenai Sosiologi tentulah harus bersifat kira-kira dan sangat disederhanakan. Demikian pula halnya dengan Sosiologi Distribusi, di mana harus dicari variabel-variabel yang tepat untuk memberi penjelasan mengenai proses distribusi dalam masyarakat. Lebih lanjut, landasan untuk mengenal Sosiologi Distribusi adalah dengan mempelajari asumsi-asumsi dasar tentang manusia dan masyarakat sebagaimana diuraikan berikut.

Manusia dan Masyarakat

Untuk Saudara ketahui dalam perspektif Sosiologi adalah bahwa salah satu fakta mendasar tentang adanya manusia adalah gabungan yang aneh antara sifat baik dan sifat buruk di dalam kehidupan manusia. Apabila kita melihat pada satu sisi, manusia melakukan suatu tindakan yang luar biasa dengan mengorbankan dirinya dan berjuang untuk kepentingan dirinya. Sedangkan pada sisi lain, manusia bertindak dengan sangat bengisnya dan malahan manusia dapat bersifat egois. Dualisme aneh ini telah menjadi sumber inspirasi yang tidak habis-habisnya untuk dibahas.

Penyelesaian secara klasik ditemukan adanya keterkaitan antara teori radikal dan teori konservatif, hanya saja, ada perbedaan dalam identifikasi sumbernya. Menurut teori radikal, masyarakat cenderung diidentifikasi sebagai sumber kejahatan. Manusia pada dasarnya baik, dan kejahatan dalam tindakannya merupakan refleksi adanya pengaruh dari institusi-institusi yang korup. Sebaliknya, teori konservatif umumnya mempertahankan bahwa kejahatan berasal dari sifat egois yang ada pada setiap individu. Dan fungsi masyarakat adalah untuk menahan dan menghambat tindakan-tindakan berbahaya yang akhirnya mendorong berkembangnya kebiasaan-kebiasaan yang baik.

A. SIFAT ALAM MANUSIA

Manusia sebagai makhluk sosial, berarti juga mengatakan bahwa masyarakat di mana dia dilahirkan telah membentuk karakter dan kepribadiannya masing-masing. Dalam hal ini tidak dapat mengendalikannya dan sering kali tidak pula dia sadari. Seperti yang ditulis Peter L. Berger bahwa “masyarakat tidak hanya mengendalikan pergerakan kita, tetapi

membentuk identitas, pikiran, dan emosi kita. Struktur masyarakat menjadi struktur diri kita secara sadar. Masyarakat tidak berhenti hanya sampai di permukaan kulit kita. Masyarakat menembus diri kita sedalam-dalamnya yang mungkin untuk ditembus”.

Bertahun-tahun yang lampau, William Graham Summer menemukan istilah “kerja sama antagonis” untuk menyatakan gambaran yang berlawanan asas dari kehidupan manusia. Manusia dibawa ke dalam asosiasi dan ditahan di sana oleh keinginan yang kuat, dorongan yang kuat akan keinginan pribadi. Dikatakannya pula bahwa tidak selamanya manusia bekerja sama atas dasar kemauan baik sebagaimana adanya.

Para penganut kepercayaan tindakan pengorbanan diri digambarkan oleh Eric Houfer dalam frase yang mudah dimengerti, yaitu anggota fanatik yang berdedikasi dari pergerakan sosial yang “telah menemukan cara mengobati manusia yang sakit” dan dipersiapkan untuk mendorong/memaksa diadopsi pada tekanan dunia yang bodoh. Meskipun para penganut kepercayaan diyakinkan bahwa pengorbanan dirinya sendiri itu adalah untuk kebaikan sahabat-sahabatnya, sementara yang lain memandang adanya keuntungan fisik yang besar yang diharapkan dalam pengorbanan dirinya terhadap pergerakan sosial itu. Pengorbanan diri semacam itu disebut trik penipuan; tindakan para penganut keyakinan jarang sekali melayani kebutuhan orang lain sebagaimana yang orang lain lihat.

Bentuk pertanyaan lain dari pengorbanan diri adalah keinginan menolong orang lain sebagai suatu perbuatan yang mulia (*noblesse oblige*). Sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa pengorbanan diri sebagai suatu pemberian, atau sumbangan atau memberikan pelayanan kepada umum, yang mana tidak menghasilkan imbalan yang nyata bagi diri sendiri.

B. SIFAT ALAM MASYARAKAT

Setelah Saudara memahami sifat alam manusia, sekarang akan membahas sifat alam masyarakat. Dari latar belakang pandangan yang telah Saudara pahami sebelumnya tentang manusia maka Saudara sekarang akan lebih mudah untuk beranjak ke masalah yang lebih sulit dari sifat alam manusia yang ada pada masyarakat. Di sini terdapat berbagai macam konflik yang mendasar antara pandangan konservatif dan radikal dan antara kelompok intelektualis, fungsionalis kontemporer, dan para pembuat teori konflik.

Pada tradisi konservatif masyarakat manusia sering kali dibandingkan dengan organisme biologis. Organisme *pertama*, mereka adalah sistem yang tersusun atas bagian-bagian yang terspesialisasi dan interdependen (saling ketergantungan), *kedua*, keseluruhannya secara normal, hidup lebih lama dan di antara bagian-bagiannya yang secara kontinu digantikan, *ketiga*, keseluruhannya memiliki kebutuhan yang mesti bersesuaian agar dapat bertahan dan tumbuh dengan subur, dan fungsi dari bagian-bagian tersebut adalah untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhannya melalui kegiatan-kegiatan yang terspesialisasi.

Singkatnya, masyarakat sebagaimana halnya organisme adalah suatu sistem di mana keberlangsungan hidup dan keberadaannya secara keseluruhan tercapai melalui pembagian kerja sama dari bagian-bagian yang kecil. Melalui kerja sama ini kebaikan keseluruhan diperoleh. Dan sebagai konsekuensinya, kebaikan bagi semua bagian-bagian kecil diperoleh juga.

Bukan suatu kebetulan jika satu dari pernyataan-pernyataan utama dari teori konservatif modern memberi judul “Sistem Sosial”. Teori fungsionalis biasanya merupakan teori sistemik, yang memposisikan karakter sistemik dari masyarakat manusia pada mulanya. Kemudian menjelaskan tindakan pada bagian-bagian dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan dan pencapaian-pencapaian yang diharapkan bagi keseluruhannya. Sebaliknya, teori konflik berkarakter antisistemik. Teori ini menekankan bahwa konflik dan perjuangan yang secara konstan mengancam untuk merusak struktur masyarakat. Teori radikal cenderung memandang masyarakat manusia ditempatkan di tengah-tengah, di mana konflik-konflik kehidupan berlangsung atau terjadi. Hal ini penting karena karakteristik-karakteristiknya. Misalnya tingkat perkembangan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh hasil perjuangannya. Objek perhatian utama adalah perjuangan dalam memperjuangkan golongannya, bukan masyarakat pada umumnya.

Untuk mengintegrasikan dan mensintesis tinjauan yang sah dari kedua tradisi di atas maka penting diuji kembali dengan beberapa konsep mengenai “sistem”, yang mana penting sekali maknanya bagi teori konservatif. Ini adalah konsep di mana teori sosial tidak dapat diabaikan, tetapi keduanya tidak dapat diterima begitu saja tanpa kritik, sebagaimana yang dilakukan saat ini.

Sumber kesulitan terbesar adalah bahwa konsep ini secara normal mengandung istilah-istilah yang pasti. Jika agregasi masyarakat adalah saling

ketergantungan pada setiap derajat penghargaan, para fungsionalis merasa pembenaran dalam menganalisis cara pandang hidup mereka dalam istilah-istilah sistemik. Dengan latar belakang ini mereka kemudian melanjutkan pengembangan analisis mereka, yang menekankan pada penemuan pemanfaatan sosial dalam setiap pola tindakan yang dibangun.

Penggunaan analisis ini membuktikan dua fakta penting yaitu: *Pertama*, bahwa sistem-sistemnya sangat berbeda-beda dalam tingkatannya pada bagian yang ketergantungan dan integral. Bagian-bagian yang menjadi unsur pokok masyarakat manusia memperoleh ukuran yang tidak terpengaruh dan otonomi yang jauh melampaui dari bagian sistem organisme biologis atau sistem mekanis. *Kedua*, tidak ada sistem sosial manusia yang sempurna di mana tindakan-tindakan pada bagian-bagiannya secara lengkap tersubordinasi pada kebutuhan-kebutuhan milik keseluruhan. Ini adalah struktur teori yang tidak memiliki rekan atau bahkan perkiraan jarak jauh dari dunia nyata.

Fakta-fakta ini mempunyai implikasi penting bagi teori sosial. *Pertama*, jika tidak ada sistem sosial yang sempurna seperti ini, kita sebaiknya menghentikan teori perputaran yang mempostulatkan eksistensi mereka dan mengarahkan energi kita langsung ke penyusunan teori yang berasumsi secara eksplisit bahwa semua organisasi manusia adalah sistem yang tidak sempurna. *Kedua*, teori-teori sosial sebaiknya berhenti mencoba menemukan kegunaan sosial dari semua pola kebiasaan manusia yang bervariasi. Mereka sebaiknya mengenali bahwa banyak pola tindakan terbentuk melalui antisosial dan tak memiliki kontribusi kepada kebaikan yang umum. *Ketiga*, kita sebaiknya berharap untuk menemukan baik kerja sama maupun konflik sebagai fenomena kehidupan manusia yang kontinu dan normal, dan sebaiknya berhenti memandang konflik sebagai suatu kondisi patologis atau abnormal sebagaimana sering dilakukan oleh teori fungsionalis kontemporer. *Keempat*, kita sebaiknya lebih mengabdikan perhatian pada penyebab dan akibat dari variasi derajat integrasi kelompok. *Kelima*, kita harus belajar untuk memikirkan sistem distributif sebagaimana refleksi simultan dari kebutuhan-kebutuhan unit yang masing-masing saling menumbangkan satu dengan lainnya.

C. HUBUNGAN ANTARA KEPENTINGAN MASYARAKAT DAN KEPENTINGAN INDIVIDU

Di sini perhatian para penganut teori konservatif sering kali mengingkari bahwa ada konflik mendasar antara kepentingan kelompok dan kepentingan individu. Teori ini menegaskan bahwa kebaikan bagi suatu masyarakat adalah kebaikan bagi individu, dan sebaliknya kejahatan masyarakat adalah kejahatan individu juga. Upaya klasik di masa modern yang terkenal adalah risalah dari Adam Smith dalam *The Wealth of Nations*. Ia mengembangkan kasus yang sangat mengesankan bagi tesisnya. Sudut pemikirannya mengatakan bahwa pencarian kepentingan individu oleh masing-masing anggota masyarakat berakhir bagi keuntungan masyarakat secara keseluruhan. Setelah Adam Smith, satu abad kemudian penganut Darwinian mengembangkan tesis yang serupa. Mereka mempertahankan bahwa sebagai suatu hasil hukum seleksi alam, hanya yang terkuat yang mampu bertahan. Jadi sekali lagi pencarian kepentingan pribadi berakhir bagi keuntungan masyarakat secara keseluruhan.

Logikanya, tidak mungkin kepentingan-kepentingan masyarakat mampu bersaing dengan kepentingan-kepentingan seluruh anggotanya, jika di antara kepentingan-kepentingan seluruh anggotanya tidak dapat bersaing pada setiap tingkatan yang dapat dihargai. Dengan kondisi seperti ini maka yang paling mungkin adalah kepentingan masyarakat konsisten dengan kepentingan sebagian anggota masyarakat. Sebagaimana yang akan kita lihat kemudian, ada alasan bagus untuk diyakini bahwa kebanyakan masyarakat sepanjang sejarah hanya sejumlah kecil kepentingan anggota minoritas yang secara signifikan teridentifikasi dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

1. Kepentingan Individu

Pada dasarnya manusia mempunyai kepentingan, dan kepentingan masing-masing individu berbeda-beda. Penting untuk dikenali bahwa setiap manusia tidak memiliki tujuan yang sama bahkan mereka yang memiliki tujuan yang sama sekalipun tidak selalu ditempatkan pada tingkatan yang sama. Perbedaan semacam ini dipandang penting karena manusia secara tetap atau konstan menghadapi kenyataan keharusan untuk memilih di antara tujuan-tujuan yang diinginkannya.

Konsep para ahli ekonomi tentang kegunaan marjinal (*marginal utility*) mengemukakan komplikasi lain. Berkaitan dengan banyaknya tujuan, perbedaan nilai dengan jumlah hasil yang diperoleh. Hampir semua orang lebih berkorban bagi sepasang sepatunya yang pertama ketimbang yang kedua, dan lebih berkorban untuk sepasang sepatunya yang kedua ketimbang yang selanjutnya. Kenyataan yang sama dari kebanyakan barang dan jasa, nilai lebih terletak pada unit-unit pertama daripada yang berikutnya.

2. Kepentingan Masyarakat

Kepentingan-kepentingan masyarakat lebih sukar didefinisikan daripada kepentingan-kepentingan individu. Hal ini disebabkan karena masyarakat-masyarakat manusia adalah jenis sistem-sistem yang tidak sempurna. Para anggotanya sering kali bekerja pada tujuan yang saling bersilangan/bertentangan satu dengan lainnya, dan tindakan-tindakannya sering kali membahayakan sebagian anggota masyarakat lainnya.

Jika prinsip yang sama diterapkan pada masyarakat manusia, kita diharuskan untuk mendefinisikan sebagai tujuan dari masyarakat yang ada tanpa memandang bahaya atau tidaknya yang mungkin mereka lakukan bagi anggota-anggota individu, bahkan mayoritas. Ini berarti, efeknya bahwa masyarakat tersebut dikendalikan oleh kelas yang dominan, di mana mereka memiliki kekuatan untuk menentukan arah terkoordinasi dari masyarakat. Dengan demikian tujuan-tujuan masyarakat adalah tujuan-tujuan dari kelas yang dominan ini. Pendekatan ini membantu menjernihkan hubungan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Sehingga menjadi jelas bahwa kepentingan-kepentingan individu dan masyarakat sama sekali tidak sama, baik tergantung pada luasnya sifat alam masyarakat maupun posisi individu itu sendiri dalam masyarakat.

Seseorang dapat mengatakan bahwa tindakan-tindakan masyarakat yang terkoordinasi lebih luas diarahkan ke satu atau dua tujuan mendasar, karena:

Pertama dan paling utama diarahkan menuju pemeliharaan *status quo* politis dalam kelompok. Karena stabilitas yang sempurna atau keseimbangan tidak mungkin terjadi maka tujuan ini lebih baik diuraikan sebagai minimalisasi laju perubahan politik internal.

Kedua adalah maksimalisasi produksi dan sumber daya di mana produksi tergantung padanya. Kadang-kadang usaha untuk mempromosikan kemajuan teknologi, sering melalui perang dan melalui perebutan kekuasaan.

Masyarakat sebagaimana halnya individu-individu secara mendasar adalah unit-unit yang melakukan pencarian diri (mencari diri sendiri). Pada kenyataannya, sejarah hubungan antar masyarakat membuktikan bahwa unsur *self seeking* dalam masyarakat lebih sering diucapkan dari pada dalam individu-individu.

3. Perspektif Teoritis dalam Relasi Masyarakat dan Individu

Secara teoritis pertentangan antara pandangan yang memberatkan peran masyarakat atau struktur di atas individu dengan pandangan yang memberatkan peran individu di atas masyarakat, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa paradigma. Burrell (1985) membagi paradigma tersebut dalam 4 kategori berdasarkan karakteristik Ilmu Sosial yang diyakini dan sifat masyarakatnya. Masing-masing karakter (Sifat ilmu sosial dan Sifat masyarakat) dijadikan garis kontinum dan dipersilangkan, sehingga membentuk 4 kuadran paradigma. Setiap paradigma akan memberikan analisis yang berbeda terhadap dinamika distribusi di dalam masyarakat.

a. *Pandangan tentang sifat ilmu sosial.*

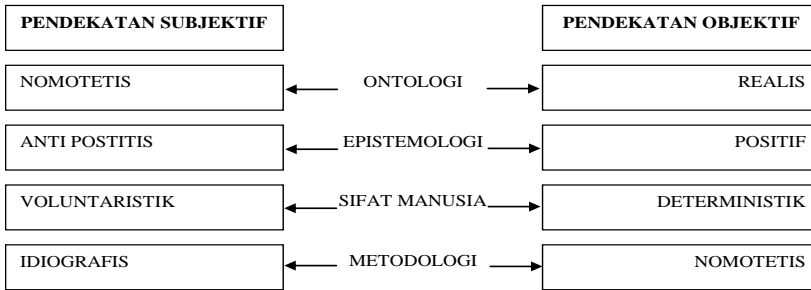
Pandangan tentang sifat ilmu sosial, menurut Burrell dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok pendekatan besar, yaitu:

- 1) Pendekatan Objektif.
- 2) Pendekatan Subyektif.

Kedua pendekatan ini berbeda secara mendasar dari semua segi ilmu yang dikembangkan, yaitu pandangan Ontologis, Epistemologis, Sifat manusia, dan Metodologi yang dipakai.

Secara epistemologis, tugas ilmu pengetahuan sosial adalah mendeskripsikan secara rinci penilaian dan pemahaman yang melatar belakangi tiap tindakan individu maupun individu bersama kelompoknya. Deskripsi ini juga bersifat analitis. Dalam penemuan ini, fakta dilihat secara ideografis.

Secara skematis, pembagian ilmu di atas, dapat digambarkan sebagai berikut.



b. Pandangan tentang Sifat Masyarakat

Burrell membagi pandangan terhadap sifat masyarakat menjadi 2 bagian besar, yaitu:

- 1) Pandangan (perubahan) radikal.
- 2) Pandangan keteraturan (*order/regulation*).

Pandangan (perubahan) radikal melihat sifat dasar masyarakat adalah selalu mengalami perubahan secara radikal. Keteraturan yang muncul dalam masyarakat adalah karena adanya kekuatan dominan yang mengungguli kekuatan dan kepentingan lain di dalam masyarakat. Namun demikian, pada suatu saat akan muncul kekuatan lain yang lebih kuat dan menggantikan kekuatan dominan. Kontradiksi dan persaingan antara kekuatan dominan untuk saling mengungguli dan menguasai adalah dinamika masyarakat yang selalu tetap terjadi.

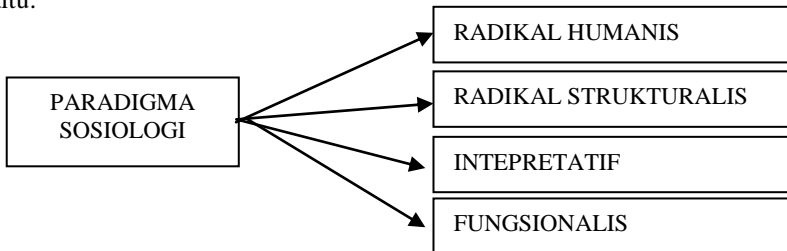
Sebaliknya, pandangan keteraturan (*order*) melihat sifat dasar masyarakat adalah stabil dan tertib. Keadaan ini dihasilkan dari konsensus dan solidaritas. Konflik dan persaingan adalah kondisi sementara yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan. Kepentingan integrasi sosial di dalam masyarakat mendorong setiap konflik dan persaingan untuk segera diselesaikan dan kembali ke dalam posisi teratur atau *order*. Dengan kata lain masyarakat selalu teratur dan terata atau *regulated*.

Burrel membagi kedua sifat pandangan tersebut sebagai berikut.

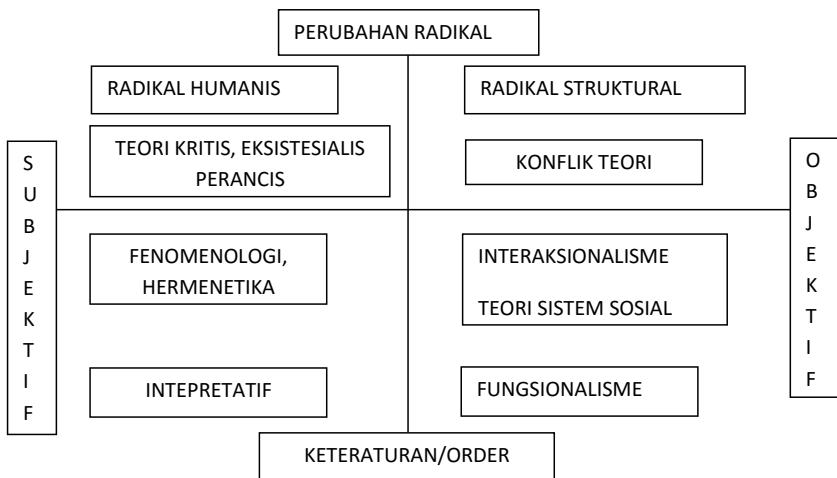
Pandangan Regulasi	Pandangan (Perubahan) Radikal
Status quo	Perubahan radikal
Tertib Sosial (<i>Social Order</i>)	Konflik Struktural
Konsensus	Dominasi
Integrasi sosial dan kohesi	Kontradiksi
Solidaritas	Emanipasi
Kepuasan kebutuhan	Deprevisasi
Aktualitas	Potensialita

c. *Paradimatis*

Berdasarkan kedua penggolongan sifat ilmu sosial dan sifat masyarakat di atas, Burrel, kemudian mempertemukan dalam 4 kuadran paradimatis, yaitu:



Keempat paradigma di atas, merupakan pertemuan 4 kuadran yang di dalamnya dapat dimasukkan beberapa teori atau perspektif dalam Sosiologi. Burrel membaginya sebagai berikut.



Matriks di atas menggambarkan pertemuan kedua pandangan tentang ilmu sosial dan sifat masyarakat. Pertemuan tersebut menghasilkan 4 (empat) paradigma dan di dalamnya ada beberapa contoh teori yang berada dalam paradigma tersebut. Tentu Saudara dapat mengisi berbagai teori Sosiologi lain dalam masing-masing paradigma.

Dalam kaitannya dengan Sosiologi distribusi, uraian di atas berguna bagi Saudara untuk memahami bahwa ada perbedaan penjelasan terhadap sistem distribusi dalam masyarakat. Bagi mereka yang percaya dengan paradigma struktural radikal, maka distribusi barang dan jasa dalam masyarakat terjadi mengikuti hukum kelompok dominan yang berkuasa. Dominasi ini akan mengembangkan aturan distribusi sedemikian rupa sehingga barang dan jasa akan lebih banyak diperoleh oleh orang atau kelompok yang berkuasa atau dominan dibandingkan dengan yang tidak berkuasa. Pandangan di atas, akan berbeda dengan pandangan fungsionalis, yang melihat bahwa distribusi adalah sistem yang diperlukan oleh masyarakat untuk mendistribusikan barang dan jasa secara tepat sesuai dengan fungsi dan kebutuhan di dalam masyarakat. Distribusi yang timpang dan menumpuk di salah satu orang atau kelompok, akan menyebabkan ketidakstabilan masyarakat. Oleh karena itu, harus di rubah dan diperbaiki. Demikianlah, paradigma tersebut bisa memberikan pandangan yang berbeda terhadap sistem distribusi di dalam masyarakat.

Sebelum Saudara melanjutkan mempelajari Kegiatan Belajar 2, cobalah melatih diri sendiri dengan menjawab soal berikut.

Coba Saudara bedakan ruang lingkup kajian dan juga berilah contoh, tentang perbedaan keempat ilmu ini:

- a. Sosiologi Ekonomi
- b. Sosiologi Produksi
- c. Sosiologi Konsumsi
- d. Sosiologi Distribusi



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Cobalah jelaskan mengenai Sosiologi Distribusi sebagai suatu disiplin ilmu yang mengalami perkembangan!
- 2) Jelaskan mengenai hipotesis-hipotesis yang digunakan dalam studi Sosiologi Distribusi!
- 3) Mengenal masyarakat tidak berbeda dengan mengenali diri sendiri? Setujukah Saudara dengan pernyataan ini? Jelaskan jawaban Saudara!
- 4) Sifat alam manusia menjadi bagian penting untuk dibahas dalam kegiatan belajar ini. Menurut Saudara apa pentingnya pemahaman ini dalam Sosiologi distribusi?
- 5) Dalam Sosiologi terdapat lebih dari satu paradigma atau perspektif dalam memandang realitas sosial, termasuk realitas distribusi. Coba Saudara jelaskan.

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Untuk dapat menjawab secara tepat pertanyaan-pertanyaan dalam latihan ini, pelajari dengan cermat materi dalam Kegiatan Belajar 1. Apabila Saudara masih belum merasa paham, diskusikan dengan teman atau tutor Saudara.
- 2) Untuk latihan nomor 1, penjelasan Saudara harus memberi perhatian pada kata di akhir kalimat (yang mengalami perkembangan). Dari penjelasan perkembangan tersebut Saudara akan mendapatkan peta ilmu Sosiologi Distribusi. Berpikirlah rekreatif mungkin, Saudara dapat menemukan hipotesis lain.
- 3) Untuk latihan nomor 2 Saudara harus membuka kembali hipotesis-hipotesis yang sudah dijelaskan sedikitnya ada dua hipotesis yang disebutkan (hipotesis kebutuhan dan kekuasaan).
- 4) Sebagai arahan, sebaiknya Saudara perhatikan konsep-konsep tradisi konservatif, teori sistematik, interdependensi. Khusus untuk nomor 4 coba Saudara hubungkan antara individu - masyarakat dan teori distribusi suatu barang atau jasa.

- 5) Pertanyaan nomor 5, Saudara perhatikan pembagian dari Burrell tentang paradigma Sosiologi, kemudian coba Saudara cari contoh dalam kehidupan sehari-hari.



RANGKUMAN

Bidang ilmu Sosiologi terbagi dalam dua bagian utama, yaitu statika sosial dan dinamika sosial. Dalam statika sosial, institusi utama atau kompleks institusi utama di dalam masyarakat dianggap sebagai satuan utama dalam analisis Sosiologi, dan Sosiologi dianggap sebagai jalinan hubungan antara institusi-institusi tersebut. Sedangkan dalam bagian dinamika sosial, yang dititikberatkan adalah masyarakat secara keseluruhan sebagai suatu satuan analisis, dan harus memperlihatkan bagaimana masyarakat berkembang dan berubah dari masa ke masa. Sosiologi Distribusi merupakan salah satu cabang Sosiologi yang menitikberatkan pada aspek dinamis dalam masyarakat, yaitu struktur sosial.

Manusia pada dasarnya berjuang untuk mempertahankan dirinya sendiri. Dan perjuangan manusia dalam mempertahankan diri telah menjadi budaya manusia. Kehidupan sosial, selain untuk mempertahankan spesies juga untuk memaksimalkan kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan kerja sama dengan individu lain. Dengan kerja sama, manusia dapat memuaskan kebutuhan dan keinginannya dengan lebih efisien. Di samping manusia melakukan kerja sama tersebut, manusia tetap mencari cara untuk memaksimalkan kepuasannya. Untuk memaksimalkan kepuasannya ini hanya dapat diperoleh jika kegiatan tersebut menempati suatu sistem kerangka kerja dan hak-hak dasar dari individu dijamin.

Sifat alam masyarakat pada tradisi konservatif sering kali dibandingkan dengan organisme biologis. Sebagaimana halnya organisme sebagai suatu sistem keberlangsungan hidup dan keberadaannya tercapai melalui pembagian kerja sama dari bagian-bagian yang kecil. Dalam melihat masyarakat manusia, terdapat perbedaan pandangan atau paradigma dalam Sosiologi yaitu antara teori fungsional, teori interpretatif dan struktural radikal, dan struktural humanis. Masing-masing pandangan mempengaruhi cara analisis dan penilaian terhadap realitas distribusi di dalam masyarakat.

**TES FORMATIF 1** _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Yang dianggap sebagai Bapak Sosiologi adalah
 - A. Karl Marx
 - B. Max Weber
 - C. Auguste Comte
 - D. Emile Durkheim

- 2) Sosiologi Distribusi merupakan salah satu cabang dari studi Sosiologi. Yang pertama kali, membuat pembagian ilmu Sosiologi ke dalam sub-sub bidang studi adalah
 - A. Karl Marx
 - B. Max Weber
 - C. Auguste Comte
 - D. Emile Durkheim

- 3) Yang merupakan pokok pembahasan yang khas dari Sosiologi adalah
 - A. institusi sosial
 - B. kelompok sosial
 - C. gerakan sosial
 - D. masalah sosial

- 4) Yang menjadi titik berat dari analisis Sosiologi Distribusi adalah aspek
 - A. dinamis dari struktur masyarakat
 - B. statis dari struktur masyarakat
 - C. konflik dari struktur masyarakat
 - D. fungsional dari struktur masyarakat

- 5) Proses distribusi merupakan proses pengalokasian sesuatu yang bernilai langka baik melalui pertukaran sosial maupun melalui pasar. Pemberian makna bahwa sesuatu itu bernilai ditentukan oleh
 - A. kondisi masyarakat
 - B. situasi masyarakat
 - C. konteks masyarakat
 - D. kemampuan masyarakat

- 6) Yang menjadi pokok perhatian dalam kepentingan individu pada proses distribusi adalah
 - A. pertukaran dalam mencapai status dan prestise
 - B. manusia ingin menguasai seluas-luasnya
 - C. manusia tidak ingin mendapatkan penghargaan
 - D. bagaimana individu menjadi bagian dalam distribusi

- 7) Kepentingan individu tidak identik dengan kepentingan masyarakat karena
 - A. individu seleksi masyarakat
 - B. kepentingan individu berbeda-beda sedangkan kepentingan masyarakat harus mengutamakan kepentingan seluruh/sebagian besar anggotanya
 - C. kepentingan individu berasal dari kepentingan masyarakat
 - D. kepentingan masyarakat berasal dari kumpulan kepentingan individu

- 8) Kesejahteraan masyarakat berasal dari dinamika, sedangkan kepentingan individu berasal dari idenya
 - A. Adam Smith
 - B. Eric Houfer
 - C. Durkheim
 - D. David Ricardo

- 9) Ahli yang membantu untuk memahami pentingnya peran jaringan sosial dalam ekonomi adalah
 - A. Adam Smith
 - B. C.H Cooley
 - C. Granovetter
 - D. Durkheim

- 10) Konsep ahli ekonomi tentang *Embeddedness* digunakan untuk menjelaskan
 - A. Lembaga ekonomi
 - B. Kepentingan individu
 - C. Kepentingan masyarakat
 - D. Hubungan kepentingan individu dan masyarakat

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Pola-pola Sistem Distribusi Masyarakat Meramu, Pertanian, dan Industri

Setelah di Kegiatan Belajar 1 kita mempelajari Sosiologi Distribusi sebagai suatu disiplin ilmu dan membahas asumsi dasar tentang manusia dan masyarakat sebagai fondasi dalam memahami Sosiologi Distribusi, selanjutnya pada Kegiatan Belajar 2 ini kita akan mempelajari tentang perkembangan masyarakat yang berlangsung secara bertahap (*evolusioner*).

Proses *evolusioner* dalam masyarakat manusia ini dimulai dari masyarakat meramu dan berburu sampai masyarakat industri. Dalam Kegiatan Belajar 2 ini pembahasan yang dipergunakan adalah pandangan mengenai perkembangan masyarakat yang dikemukakan oleh G. Lesnki.

Menurut G. Lesnki masyarakat manusia berkembang secara ‘*linear evolusioner*’. Artinya bahwa masyarakat manusia berkembang secara bertahap mengikuti arah garis lurus. Untuk mencapai bentuk masyarakat dalam tahap yang lebih tinggi, satu bentuk masyarakat tertentu harus melewati bentuk masyarakat dalam tahap sebelumnya, begitu seterusnya. Proses perkembangan masyarakat tersebut, lanjut Lesnki, dipicu dan digerakkan oleh faktor utama, yaitu kemajuan teknologi. Teknologi di sini diartikan sebagai cara-cara atau teknik-teknik dasar yang dimiliki oleh suatu masyarakat untuk mengolah lingkungan alamnya demi mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Teknologi dikatakan semakin efisien, lanjut Lesnki, dapat diukur melalui perbandingan antara jumlah *out put* hasil produksi per unit dengan jumlah energi yang dikeluarkan untuk memproduksi hasil produk tersebut. Jadi efisiensi di sini berarti tidak saja terlihat dari jumlah produksi yang semakin meningkat, namun juga terlihat dari perubahan cara-cara atau teknik-teknik yang lebih baik dan mudah. Melalui ukuran-ukuran inilah maka Lesnki kemudian menyimpulkan bahwa masyarakat manusia hingga saat ini telah berkembang melalui beberapa tahapan:

1. Tahap masyarakat meramu dan berburu.
2. Tahap masyarakat hortikultura sederhana.
3. Tahap masyarakat hortikultura intensif.
4. Tahap masyarakat pertanian.
5. Tahap masyarakat industri.

Kelima tahapan tersebut akan kita pelajari lebih mendalam pada uraian berikut ini.

A. TATANAN MASYARAKAT MERAMU DAN BERBURU

1. Gambaran Umum Masyarakat Meramu dan Berburu

Masyarakat meramu dan berburu umumnya mengembangkan cara hidup *nomaden* (berpindah-pindah) dan jarang membangun tempat tinggal yang permanen. Hal ini didorong oleh karena masyarakat meramu dan berburu lebih merupakan masyarakat pengumpul ketimbang masyarakat penghasil makanan.

Contoh masyarakat meramu dan berburu adalah masyarakat suku Kubu di Sumatera, masyarakat suku Punan di Kalimantan, masyarakat suku pedalaman di kepulauan Andaman, suku Pyguis dan Busman di Afrika, dan lain-lain. Masyarakat berburu dan meramu biasanya hidup dalam kelompok-kelompok kecil dengan rata-rata penduduknya berjumlah 50 orang. Karena jumlah penduduknya sangat kecil maka masyarakat meramu dan berburu umumnya merupakan masyarakat satu komunitas (*single community*) atau disebut juga sebagai satu bentuk kelompok lokal (*local bands*).

2. Teknologi dan Pola Produksi pada Masyarakat Meramu dan Berburu

Masih sangat sederhananya pola teknologi dan pengetahuan yang mereka kuasai, hidup dan kehidupannya yang mereka kembangkan menjadi sangat sederhana dan sangat bergantung pada sumber daya yang disediakan langsung oleh alam. Secara Sosiologis, hal ini menjadikan masyarakat meramu dan berburu dapat dipandang sebagai satu komunitas lokal atau komunitas tunggal yang otonom dan bersifat swadaya, baik dalam bidang sosial ekonomi, politik, dan budaya mereka.

Dari segi jenis barang yang diproduksi, barang-barang yang mampu diproduksi oleh masyarakat meramu dan berburu hanya sebatas barang-barang yang penting (*essential goods*) dalam hidup mereka. Barang-barang itu umumnya adalah barang sandang seperti pakaian yang terbuat dari kulit hewan atau kulit kayu; barang-barang pangan seperti bahan makanan barang-barang untuk mengumpulkan bahan makan atau keranjang yang terbuat dari kulit kayu atau akar-akar tumbuhan dan berbagai peralatan perang, seperti pisau, tombak yang terbuat dari tulang, gading atau batu, dan perisai yang

terbuat dari kayu. Dari segi kuantitas (jumlah) barang, ternyata jumlah (volume produksi) barang yang diproduksi oleh masyarakat meramu dan berburu masih sangat kecil. Dan dari segi kualitasnya, ternyata barang-barang hasil produksi tersebut masih sangat kasar dan tidak tahan lama.

3. Sistem Kepemilikan dalam Masyarakat Meramu dan Berburu

Teknologi yang dikuasai oleh mereka memang masih sangat sederhana. Produksi barang dalam masyarakat meramu dan berburu yang dihasilkan dalam segi jenis, kualitas maupun kuantitasnya pun sangat terbatas, dalam arti bahwa produksi barang dalam masyarakat meramu dan berburu hanya mampu untuk menopang kehidupan subsistensi mereka.

Untuk mengatasi kerawanan-kerawanan tersebut dan sekaligus pula untuk menjaga agar masyarakat meramu dan berburu tetap eksis, biasanya segala sarana produksi yang penting dan barang-barang hasil produksi (jenis maupun jumlah barang hasil produksi) harus mereka orientasikan untuk kepentingan dan kebutuhan kolektif secara keseluruhan. Untuk itu maka segala sarana produksi dan hasil produksi pun harus dimiliki secara kolektif.

4. Struktur Sosial Masyarakat Meramu dan Berburu

Pada masyarakat meramu dan berburu, terlihat belum ada atau masih sangat rendahnya tingkat spesialisasi peran dari institusi yang terdapat dalam masyarakat. Berbagai peran-peran dalam kehidupan politik ekonomi dan militer umumnya diorganisasikan dalam satu wadah organisasi, yaitu organisasi rumah tangga atau keluarga. Dengan adanya kedua ikatan inilah maka organisasi sosial rumah tangga biasanya dijadikan sebagai unit-unit dasar yang membentuk organisasi sosial lain yang lebih luas, dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial.

Biasanya pembagian kerja yang ada pada masyarakat meramu dan berburu umumnya hanya didasarkan pada umur atau jenis kelamin. Selain didasarkan oleh jenis kelamin dan umur, pada masyarakat meramu dan berburu pun memang telah terdapat beberapa pembagian jenis pekerjaan yang didasarkan oleh kemampuan atau keahlian seseorang, misalnya pekerjaan sebagai pemimpin masyarakat atau sebagai dukun. Namun, sifat pembagian jenis pekerjaan tersebut belum tegas benar. Sebagai contoh walaupun dalam masyarakat meramu dan berburu terdapat seorang pemimpin atau dukun namun, peran sebagai pemimpin maupun dukun tersebut hanya bersifat sebagai pelengkap saja (*part time speciality*).

Dari sisi kekuasaan politik, hal ini menandakan bahwa kekuasaan pemimpin dalam masyarakat meramu dan berburu sangat terbatas dan sangat kecil. Dengan peran-peran yang bersifat sementara (*part time speciality*) tersebut, pemimpin dalam masyarakat meramu dan berburu berarti tidak sungguh-sungguh mempunyai kedudukan atau otoritas.

5. Sistem Distribusi Masyarakat Meramu dan Berburu

Para sosiolog berpendapat bahwa masyarakat meramu dan berburu merupakan masyarakat yang tidak berstratifikasi atau masyarakat *egaliter*. Hal ini berarti dalam masyarakat meramu dan berburu tidak dikenal pelapisan kelompok-kelompok sosial/kelas-kelas sosial, terutama berdasarkan kekuasaan, *privilege* dan *prestige*. Walau pada masyarakat tersebut tidak berstratifikasi, bukan berarti pada masyarakat meramu dan berburu tidak ada ketidaksamaan sosial. Pada masyarakat meramu dan berburu, ketidaksamaan sosial pada umumnya disebabkan oleh perbedaan *prestige* yang didasarkan oleh umur, jenis kelamin, dan karakteristik personal.

Terdapat dua jenis resiprositas, yaitu *balance reciprocity* dan *generalized reciprocity*. Pada masyarakat meramu dan berburu, sistem distribusi yang mereka kembangkan umumnya cenderung ke pola *generalized reciprocity*. *Generalized reciprocity* terjadi manakala para individu diwajibkan memberikan kepada orang lain tanpa mengharapkan pengembalian yang setara dan langsung.

Gambaran yang paling mudah kita dapatkan adalah pada kehidupan manusia purba, di mana alam sangat menentukan pola hidup sampai dengan budaya dan nilai-nilai yang berkembang di kehidupan mereka.

Kata lain, kehidupan masyarakat berburu dan meramu dapat disimpulkan mendasarkan/menyatu dengan alam tempat mereka hidup, bahkan sampai dengan budaya yang tumbuh di dalamnya. Tidak ada yang bersifat permanen karena pola hidup mereka yang berpindah-pindah.

Dinamika sistem distribusi tidak banyak terjadi karena kehidupan mereka yang bisa dikatakan terputus dengan komunitas di luar kelompok mereka.

6. Perubahan Masyarakat *Food Gathering* Menuju Sistem Distribusi Masyarakat Hortikultura Sederhana

Masyarakat hortikultura sederhana adalah masyarakat yang kehidupannya didasarkan pada pengembangan ekonomi perkebunan/ perladangan (*hortikultura economic*). Masyarakat hortikultura sederhana merupakan masyarakat pertama yang mengenal sistem pertanian walaupun masih dalam taraf yang sederhana. Sebagian dari mereka umumnya mulai hidup menetap walau sementara.

Dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang masih sangat sederhana (primitif), masyarakat meramu dan berburu hanya mampu untuk memungut secara langsung hasil-hasil alam tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Pada masyarakat hortikultura sederhana tidak demikian. Teknologi pada masyarakat hortikultura sederhana telah berkembang sedikit lebih maju, yang ditandai dengan telah dikenalnya metode dan peralatan sederhana yang dapat membantu manusia dalam mengolah sumber daya alam.

Di kalangan masyarakat hortikultura sederhana, pola kepemilikan komunisme primitif dalam pengertian yang murni biasanya tidak ada. Sebagai gantinya masyarakat hortikultura sederhana mengembangkan pola kepemilikan kolektif yang disebut pola kepemilikan oleh keluarga besar (*lineage ownerships*).

Pada masyarakat hortikultura sederhana, institusi sosial terlihat mulai mengalami perkembangan. Juga mulai muncul orang-orang yang hanya berperan atau bekerja sebagai pemimpin, (yaitu orang yang mempunyai jabatan sebagai pemimpin atau disebut juga orang besar/*big man*). Derajat akan prestise yang diciptakan oleh karakteristik personal mulai mendapat penekanan sehingga melampaui prestise yang didasarkan umur dan jenis kelamin.

Menurut Harris, sistem distribusi yang dikembangkan oleh masyarakat hortikultura sederhana lebih condong ke arah sistem distribusi yang ia namakan sistem redistribusi sederhana. Redistribusi berbeda dengan resiprositas yang merupakan dasar sistem distribusi pada masyarakat meramu dan berburu. Perbedaan ini terletak pada tata caranya. Biasanya pada sistem redistribusi murni, barang-barang yang diproduksi umumnya tidak langsung tersebar di kalangan masyarakat melalui mekanisme tradisi mereka akan tetapi, barang-barang tersebut disalurkan terlebih dahulu kepada pemimpin mereka, yang disebut “orang besar” (*the big man*).

7. Pola Distribusi Masyarakat Hortikultura Intensif

Masyarakat hortikultura intensif adalah suatu masyarakat yang anggotanya menopang hidup dan kehidupannya didasarkan pada pengembangan ekonomi perkebunan/perladangan yang dilakukan secara intensif. Secara intensif di sini diartikan bahwa ekonomi perkebunan/perladangan telah dilakukan dengan metode pertanian yang lebih maju. Selain semakin berkembangnya jumlah dan kepadatan penduduk serta hilangnya karakter nomadik pada masyarakat hortikultura intensif, kemajuan yang paling penting justru terjadi pada penguasaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut beberapa sosiolog, dengan adanya surplus produksi yang semakin besar, muncul orang-orang tertentu yang berambisi ingin menguasai surplus produksi tersebut. Orang-orang tersebut umumnya adalah para pemimpin/orang kuat yang ada dalam masyarakat hortikultura intensif. Karena itu pola kepemilikan oleh pemimpin ini muncul manakala individu-individu yang kuat menjadi pemimpin tertinggi yang merupakan pimpinan seluruh komunitas masyarakat hortikultura intensif.

Struktur sosial pada masyarakat hortikultura intensif telah jauh berbeda bila dibandingkan dengan struktur sosial masyarakat sebelumnya. Perkembangan tingkat spesialisasi peran atau fungsi institusi/organisasi sosial yang semakin meningkat ini terlihat dengan semakin banyak atau kompleksnya organisasi-organisasi sosial dan perkumpulan-perkumpulan yang ada.

Banyak sosiolog berpendapat bahwa justru stratifikasi sosial timbul pada saat terjadinya transisi menuju masyarakat hortikultura intensif. Sistem stratifikasi sosial pada masyarakat hortikultura intensif umumnya terdiri dari *tiga strata sosial utama*, yaitu: *strata teratas* adalah pemimpin, misalnya raja dan para keluarga dan kerabat raja, *strata di strata tengah* adalah sub pemimpin, misalnya para birokrat kerajaan, pejabat angkatan bersenjata, dan anggota masyarakat lain yang ada di lingkungan istana kerajaan, dan *strata paling bawah* adalah massa atau masyarakat biasa.



Sumber: www.jogjatogo.com

Gambar 1.2
Strata sosial di lingkungan keraton Yogyakarta

Gambar di atas memberikan ilustrasi tentang stratifikasi sosial yang terjadi pada kehidupan kerajaan. Meskipun saat ini kekuasaan raja secara *de jure* bisa dikatakan tidak ada, namun *prestige* maupun *privilege* yang dimiliki oleh raja dan keluarga tetap tinggi di mata abdi dalem keraton.

Bagaimana Saudara mengembangkan analisa terhadap kondisi ini, bagaimana pergeseran pola distribusi yang terjadi pada masa feodal ke masa kolonial dan masa kemerdekaan/saat ini?

Pada masyarakat hortikultura intensif, sistem distribusi yang dikembangkan lebih condong didasarkan oleh pola distribusi yang disebut sebagai redistribusi parsial atau redistribusi berstratifikasi. Pada pola redistribusi parsial, barang umumnya disalurkan kepada suatu kelompok sosial yang terpusat, lalu barang tersebut kemudian direlokasikan kembali kepada para anggota masyarakatnya.

Pada pola distribusi arus barang yang berkesinambungan di antara pemimpin dan anggota masyarakatnya merupakan arus barang yang tidak sama. Anggota masyarakat jelas memberi lebih banyak dari pada yang mereka terima kembali dari para pemimpin. Hal ini tentu berperan dalam melahirkan sistem ketidakmerataan ekonomis dalam masyarakat. Ketimpangan sosial di antara golongan-golongan tertentu dalam masyarakat hortikultura sederhana mulai nampak. Disparitas kemakmuran di antara golongan-golongan sosial mulai terjadi.

8. Sistem Distribusi Masyarakat Pertanian

Masyarakat pertanian pertama kali muncul kira-kira lima ribu sampai enam ribu tahun yang lalu di Mesir dan Mesopotamia. Dan belakangan muncul di daerah Cina dan India. Masyarakat agraris belum lama terdapat banyak di bagian dunia ini. Kemunculan pertama kalinya masyarakat agraris ini, sampai sekarang mayoritas manusia hidup secara agraris. Kebanyakan anggota masyarakat agraris adalah para petani (*peasants*). Mereka adalah produsen utama, orang yang menanam ladang dari hari ke hari dan disebut penanam tergantung (*dependent cultivator*). Ini dikarenakan mereka berada dalam hubungan ketergantungan politik dan ekonomi atau subordinat kepada para pemilik tanah.

B. TIPE-TIPE MASYARAKAT PERTANIAN

1. Masyarakat Pastoralis

Pastoralisme mulai muncul kira-kira tiga ribu sampai tiga ribu lima ratus tahun yang lalu sebagai adaptasi subsistensi yang sangat terspesialisasi terhadap lingkungan kering atau semi kering. Masyarakat pastoralis menggantungkan kehidupannya kepada sekumpulan binatang gembalaan. Mereka menggembala sepanjang tahun, dan berpindah secara musiman bersama kumpulan gembalaannya untuk mencari padang rumput (karena itu disebut *nomadisme pastoralis*). Binatang piaraannya biasanya biri-biri, kambing, unta, sapi, dan kadang-kadang rusa kutub.

2. Basseri

Basseri adalah masyarakat pastoralis yang tinggal di padang rumput kering dan pegunungan Iran Selatan. Tinggal di kemah-kemah yang berpindah-pindah bersama dengan binatang ternak mereka. Habitat mereka kering dan panas. Curah hujan tahunan umumnya berkisar di antara 10 inci atau kurang, kebanyakan hujan jatuh pada musim dingin. Binatang yang biasa dipelihara adalah biri-biri dan kambing.

C. EVOLUSI TEKNOLOGI PRA INDUSTRIAL

Para ahli ilmu-ilmu sosial pernah mempercayai bahwa semua jenis teknologi berkembang dengan sendirinya, atau berkembang dengan kekuatan independen. Menurut pandangan mereka, perubahan-perubahan teknologi

terjadi sebagai hasil kumulatif kekuatan intensif manusia. Di samping itu, dirasakan bahwa kapan pun bentuk teknologi baru muncul, orang secara otomatis mengadopsinya. Seorang ahli ilmu sosial yang bernama Ester Boserup pernah menyatakan bahwa orang tidak punya keinginan inheren untuk meningkatkan tingkat teknologi mereka. Selanjutnya dia mempostulatkan juga bahwa orang mempunyai keinginan untuk hidup dengan cara yang sederhana dan semudah mungkin. Kecenderungan mereka adalah memenuhi kebutuhan subsistensinya dengan bekerja sedikit mungkin. Boserup, percaya bahwa kondisi penting yang memaksa manusia untuk meningkatkan teknologinya adalah tekanan penduduk. Tekanan penduduk muncul ketika pertumbuhan penduduk menekan sumber makanannya.

Boserup menegaskan bahwa pada titik inilah manusia mulai mengintensifkan produksi. Mereka menggunakan bentuk teknologi baru dan bekerja lebih keras serta lama memproduksi lebih banyak makanan untuk memberi makan lebih banyak orang. Masyarakat hortikultura sederhana, misalnya mulai menggunakan teknik-teknik masyarakat hortikultura intensif. Begitu juga masyarakat hortikultura intensif mungkin berpindah ke pertanian yang menggunakan bajak.

D. STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT PERTANIAN

Secara historis, pada masyarakat ditemukan bahwa banyak ketidaksamaan dalam distribusi dari kekuasaan, *privilege*, dan kehormatan yang sebagian besar muncul dari berfungsinya sistem politik yang mereka lakukan. Secara sederhana, institusi pemerintah adalah sumber yang utama dari timbulnya ketidaksamaan sosial dalam masyarakat. Untuk memahami sifat dasar dari proses distribusi pada masyarakat pertanian, hal-hal yang perlu dimengerti pertama kali adalah sifat dasar dari negara tersebut sebagai pandangan dari masing-masing anggota masyarakat yang mempunyai pengaruh dominan atau lebih banyak terhadap berjalannya sistem negara. Bagi kelompok dominan, negara tidak hanya sebuah organisasi yang menetapkan dan menyelenggarakan sejumlah aturan-aturan dalam memperebutkan kekuasaan dan hak-hak istimewa. Secara aktual, kekuasaan tertinggi yang tetap menjadikan semua orang mendambakan untuk mendapatkan *power*, *privilege*, dan *prestige*. Akan tetapi, sebagai konsekuensinya, orang atau aparaturnegara yang melakukan pengawasan tersebut biasanya berjuang untuk mempertahankan pengawasannya,

sementara yang lainnya berusaha keras membujuk agar pengawasannya diperlunak sehingga dengan demikian dia mendapatkan bagian keuntungan yang sama atau kalau tidak, dia dipecat dari jabatannya.

1. Pola Pemilikan dalam Masyarakat Pertanian

Dalam masyarakat pertanian, produksi ekonomi ditentukan oleh keinginan dan pilihan para pemilik kekuatan-kekuatan produksi. Secara tipikal dalam masyarakat pertanian memberlakukan pola pemilikan *Seigneurial* (tuan tanah), yaitu tuan tanah ini mengklaim pemilikan pribadi atas bidang tanah di mana di atasnya hidup dan bekerja para petani dan budak yang membayar rente, pajak, dan berbagai pengabdian tenaga kepada para tuan tanahnya. Kemudian pemilikan *prebendel*, pemilikan *prebendel* ada ketika tanah dimiliki oleh pemerintah yang kuat dan menunjuk para pejabat untuk mengawasi tanamannya dan menarik semua hasilnya.

2. Pola Distribusi dalam Masyarakat Pertanian

Evolusi pola pemilikan kekayaan dalam masyarakat pertanian berhubungan dengan evolusi pola distribusi sumber daya. Semakin memprivasi sistem pemilikan, semakin tidak merata sistem distribusi. Pola redistribusi yang paling umum dalam masyarakat pertanian yang diorganisasikan dalam sistem pemilikan kekayaan yang bersifat *seigneurial* adalah *Ekspropriasi Surplus*. Hal ini terjadi manakala kelas tuan tanah memaksa kelas produsen yang tergantung secara ekonomi untuk menghasilkan surplus dari ladang mereka dan menyerahkan surplus tersebut kepada tuan tanah. Surplus tersebut ditarik dalam bentuk bunga pinjaman, berbagai jenis pajak, dan berbagai jenis pengabdian berupa tenaga.

Sebagian ahli yang mempelajari ekonomi prakapitalis, terutama sejarawan ekonomi Karl Polanyi (1957), tidak membedakan antara ekspropriasi surplus dan redistribusi parsial. Sebagai gantinya digunakan konsep retribusi untuk diterapkan pada kedua jenis aktivitas ekonomi tersebut. Namun ini tampaknya sebagai kesalahan serius dan sangat menyesatkan. Ada beberapa perbedaan krusial antara *ekspropriasi surplus* dengan *redistribusi parsial*. *Pertama*, tuan tanah mempunyai kekuasaan yang jauh lebih besar daripada para pemimpin, dan mereka menggunakan kekuasaan ini untuk meletakkan lebih banyak beban ekonomi terhadap petani produsen daripada beban yang dapat diletakkan para pemimpin terhadap para pengikut mereka. *Kedua*, arus barang dan jasa antara tuan tanah dan petani

lebih senjang daripada arus barang berharga antara para pemimpin dan orang awam. Arus barang berharga antara tuan tanah dan petani jarang dideskripsikan sebagai redistribusi, karena sedikit sekali arus balik dari tuan tanah kepada petani. Memang arus barang berharga umumnya bersifat satu arah saja, dari petani ke tuan tanah.

E. SEJARAH DISTRIBUSI TANAH PERTANIAN DAN PERUBAHAN MASYARAKAT DESA

1. Pemilikan Tanah dan Distribusi pada Jaman Sistem Kebekelan (Apanage)

Pada hukum tanah yang berlaku sejak jaman kolonial, yang dianggap sebagai perantara antara Allah dan rakyat adalah pemilik satu-satunya dari seluruh areal tanah yang terletak dalam teritorium kekuasaan mereka. Maka atas dasar inilah tercipta jurang pemisahan antara para autokrat dan masyarakat, yang juga mempunyai dasar magis-religius. Meskipun hak-hak kekuasaan pada umumnya dari para teokrat kerajaan sejak abad ke-18/19 sedikit demi sedikit dikurangi dan dialihkan kepada pemerintah kolonial Belanda, tetapi kedudukan sosial di lingkungan masyarakat feodal secara struktural formal tetap mutlak di tangan raja-raja.

2. Akibat Tindakan Perombakan (*Reform*) Pemerintah Belanda dan Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1996

Keadaan yang sudah sejak dahulu ada dan berlaku serta beberapa perombakan yang sudah dilaksanakan sejak permulaan abad ini di bekas "tanah kerajaan" di Jawa Tengah mempengaruhi dengan nyata undang-undang pemilikan tanah pertanian pada masa kini. Perombakan ini berdasarkan rencana Belanda dari tahun 1904/1909 dan hingga kini di kalangan masyarakat masih dikenal dengan istilah *Komplex-Reformen*. Tindakan administratif dan sosial ekonomi, yang dilaksanakan antara tahun 1912 dan 1918 menghasilkan aturan-aturan baru dalam bidang agraria:

- a. Penghapusan sistem *apanage* yang sudah digambarkan di atas beserta tindakan-tindakannya yang sewenang-wenang yang sudah membudaya.
- b. Beberapa kesatuan tempat tinggal (desa; *dukuh*) atau *kebekelan* digabung menjadi kesatuan administrasi baru seperti kelurahan dan desa praja.
- c. Para raja melepaskan hak-hak mereka atas sebagian terbesar dari tanah yang termasuk wilayah kesatuan administrasi ini, yang kemudian

menjadi wewenang *hanggaduh* (hak milik pribumi) anggota masyarakat desa.

- d. Diadakan pembagian baru dari persil-persil tanah dan tanah garapan untuk penduduk desa dan disesuaikan pada kebutuhan tertentu dari usaha pertanian Belanda.

Oleh karena tindakan-tindakan ini maka semua tanah desa dapat ditertibkan, di mana sampai sekarang masih berlaku hak milik tanah dengan bentuk yang berbeda-beda, demikian pula halnya dengan luas tanahnya. Dengan mengikuti hukum tradisional dan hak-hak tertulis dari kepala desa mengenai pengaturan tanah, maka bagi tiap-tiap desa lagi-lagi 1/5 bagian dari tanah pertanian disediakan untuk areal *lungguh*, *kas desa* dan *pituas*. Areal-areal tanah ini, yang luasnya sudah ditetapkan dan dimaksudkan untuk kepentingan umum masyarakat desa (*bumi kongsen*) hingga kini mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Persil, *lungguh* atau bidang tanah guna keperluan dinas, yang juga biasa disebut *bengkok*, diserahkan kepada pamong-pamong desa untuk digarap selama masa dinasnya, sebagai ganti upah. Besarnya bagian tanah garapan milik dinas ini diperinci menurut jumlah dan jabatan/tugas masing-masing pimpinan desa.
- b. Areal tanah garapan *kas desa* yang juga dikenal dengan istilah *bondo* atau *banda desa*. Hasil dari areal-areal ini digunakan untuk pembiayaan keperluan desa. Biasanya areal tanah, garapan ini disewakan kepada penduduk yang berminat dengan jangka waktu yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan tanah yang cara penggunaannya. Hasil tanah atau uang dari para penyewa dimasukkan ke kas desa.
- c. Apa yang disebut tanah *pituas* atau tanah pertanian bagi orang pensiunan gunanya untuk menyambung kebutuhan hidup dari para *bekel* yang sudah habis masa jabatannya. Mereka boleh memanfaatkan tanah itu sampai akhir hidupnya. Dalam pada itu areal-areal ini kebanyakan dialihkan menjadi milik *kas desa*.

3. Kelompok-kelompok Sosial di Pedesaan dan Pembagian Tanah Milik untuk Pertanian pada Masa Kini

Ciri khas struktur kepemilikan tanah pertanian di banyak negara di Asia Selatan dan Tenggara ialah adanya hubungan yang sangat erat dengan keadaan sosial-ekonomi dari masyarakat pedesaan. Karena itu dalam susunan

masyarakat agraris yang kurang dinamis dan tradisional di Jawa Tengah hak-hak penggunaan tanah yang berbeda-beda menentukan keadaan ekonomi seseorang, yang sejak dahulu kala merupakan ukuran tingkat kedudukan sosial seseorang dan hingga kini masih merupakan suatu ciri yang representatif bagi kedudukan sosial seseorang. Dengan demikian hal ini menimbulkan adanya berbagai tingkat sosial di lingkungan masyarakat pedesaan. Oleh sebab itu pendapat H. Wilhelmy (1975, hal. 70)., bahwa masyarakat di Jawa merupakan "masyarakat yang homogen, dan berlapisan sosial yang merata" tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Sesuai dengan apa yang diuraikan sebelumnya, sekalipun tidak disebutkan secara mendetail berapa luas tanah milik untuk pertanian, maka pada masyarakat pedesaan Jawa terdapat 6 kelompok masyarakat tradisional. Ke enam kelompok masyarakat tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Petani *kenceng*, yaitu para pemilik dari bangunan rumah, pekarangan rumah dan persil-persil tanah persawahan dan tanah pertanian tegalan. Orang-orang "desa inti" ini sebenarnya kelompok petani yang merupakan penduduk desa yang sudah lama bertempat tinggal di situ. Mereka menganggap diri sendiri sebagai keturunan kelompok pendiri desa itu;
- b. Petani *gundul*, yaitu para pemilik persil tanah persawahan atau tanah pertanian tegalan, tetapi tidak memiliki pekarangan rumah sendiri;
- c. Petani *setengah kenceng*, yaitu para pemilik "bangunan rumah dan pekarangan rumah;
- d. Petani *ngindung*, yaitu para pemilik rumah di atas pekarangan milik orang lain;
- e. Petani *templek*, yaitu para petani yang tidak memiliki tanah, kebanyakan terdiri dari orang yang sudah kawin yang tinggal di rumah sendiri dengan rumah tangga sendiri, tetapi di atas tanah pekarangan milik orang lain;
- f. Petani *tlosor*, yaitu petani-petani yang sudah kawin, tidak memiliki tanah, tak mempunyai tempat tinggal sendiri dan hidup di tempat keluarganya.

4. Cara Mewariskan Tanah Milik untuk Pertanian

Akibat kedudukan istimewa dari hak milik atas tanah pertanian pada jaman kolonial dan atas dasar patokan luas minimal tanah garapan menurut Undang-undang Pokok Agraria pada tahun 1960, maka dari dahulu hingga

sekarang pembagian areal tanah pertanian warisan, di daerah penyelidikan secara *de jure* tidak diperbolehkan. Larangan resmi ini sudah begitu mengakar dalam benak penduduk. Hal yang serupa juga diuraikan antara lain oleh Ch. B. Tripathi (1957, halo 161) tentang desa Jatiyoso di daerah Karang-Anyar, yang terletak sebelah tenggara Surakarta, oleh Cl. Geerts (1965, hal. 22) tentang "Mojokuto" (Jawa Tengah) dan oleh Soetarno (1963, h'1.1. 36) tentang Kecamatan Sukoharjo (Surakarta), di mana secara formal tidak diizinkan tanah milik untuk pertanian itu dibagi-bagi.

Bila pewaris meninggal dunia, maka haknya untuk menggarap tanah biasanya, dengan persetujuan masyarakat desa, harus diserahkan kepada puteranya yang sulung, dengan syarat bahwa ia hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut, dan ia sendiri belum memiliki areal tanah garapan serta mau mengambil alih tanah garapan berikut kewajiban-kewajibannya. Bila syarat-syarat ini tidak dapat dipenuhi, maka persil-persil tanah itu biasanya diteruskan kepada salah seorang putera lainnya. Bila tidak ada putera, sering kali hak menggarap tanah ini dialihkan kepada jandanya. Tentu janda ini harus mempekerjakan seorang pekerja pria.

Bila pada saat pewaris meninggal anak-anaknya masih di bawah umur, maka hak atas persil-persil tanah ini dialihkan kepada isterinya guna mengurusnya untuk sementara waktu dengan syarat-syarat yang sudah disebut tadi. Bila isteri pewaris sudah meninggal dan pewaris tak mempunyai putera, ada kemungkinan, bahwa warisan ini diteruskan ke. pada suami puterinya yang sulung.

Ahli waris wanita sejak dahulu hingga sekarang ini masih belum juga termasuk dalam deretan ahli waris. Bila si pewaris meninggal tanpa ada keturunan, maka bagian tanah garapannya jatuh ke tangan masyarakat desa. Bagian tanah ini atas dasar keputusan bersama para anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih serta para pemimpin desa sering kali diserahkan kepada seorang anggota masyarakat desa yang belum memiliki persil tanah untuk menggarapnya. Sebagian dari persil-persil tanah semacam ini juga dijadikan tanah garapan para pemimpin desa guna kepentingan dinas (*lungguh*).

5. Perubahan Struktur Petani dan Distribusi

Perubahan teknologi secara keseluruhan telah dapat meningkatkan produksi padi, namun bagaimana pengaruh teknologi tersebut terhadap pendapatan petani, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan, masih tetap menjadi pertanyaan sejak pengalihan "teknologi" dimulai. Teknologi seperti

penggunaan traktor dimaksud untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, terutama daerah yang tempat jadwal pengairan diatur dengan ketat (Bersten dan Rochim, 1980). Beberapa literatur menyebutkan bahwa teknologi baru dapat memperburuk distribusi pendapatan karena, petani bertanah luas lebih mudah menjangkau sumber-sumber pembiayaan dan informasi sehingga lebih banyak memperoleh keuntungan-keuntungan dari penerapan teknologi baru (antara lain : Falcon, 1970). Akan tetapi Hayami dan Kikuchi (1981) berpendapat bahwa ketimpangan distribusi pendapatan lebih banyak disebabkan oleh tekanan penduduk atas sumber daya lahan yang terbatas, sedangkan teknologi baru justru menghambat proses penyebaran pendapatan yang semakin timpang.

Kelembagaan dapat didefinisikan sebagai status perangkat aturan yang mengatur atau mengikat dan dipatuhi oleh masyarakat. Aturan-aturan tersebut menentukan tata kerja sama dan koordinasi anggota masyarakat dalam menentukan hak serta kewajiban masing-masing (Hayami dan Kikuchi, 1982). Kelembagaan pedesaan dapat berupa kelembagaan penguasaan tanah, kelembagaan hubungan kerja dan kelembagaan perkreditan.

a. *Kelembagaan Penguasaan Tanah*: hubungan penguasaan tanah bervariasi dengan bervariasinya produktivitas. Pada keadaan produktivitasnya rendah, distribusi pemilikan tanah biasanya merata.

- 1) Sistem pemilik penggarap murni seluruh tenaga kerja berasal dari tenaga kerja keluarga.
- 2) Sistem pemilik-pengelola seluruh tenaga kerja dibayar, sedangkan pemilik hanya berfungsi sebagai pengelola saja.
- 3) Sistem sambilan-sambilan. Sistem ini muncul dalam keadaan pemilikan tanah yang merata dan produktivitasnya rendah, tenaga kerja keluarga tidak mampu maka petani terpaksa meminta bantuan petani lainnya dan berkembanglah saling tukar menukar tenaga kerja.

b. *Kelembagaan Hubungan Kerja*:

- 1) Sistem bagi hasil: dalam hal ini penyepakatan pada hakikatnya adalah kontrak hubungan kerja dan agraria. Dengan sistem ini semua risiko dan pendapatan dibagi antara pemilik tanah dan buruh tani dengan perbandingan tertentu mendorong petani untuk bekerja lebih baik, karena akan Sangat berpengaruh terhadap hasil produksi. Bagi

pemilik tanah dengan sistem ini, biaya transaksi dan pengawasan tenaga kerja lebih murah.

- 2) Sistem sewa: pemilik menerima uang sewa dari penyewa secara langsung. Bagi pemilik tanah, risiko karena tidak dipengaruhi oleh fluktuasi produksi dan pasar sedangkan bagi buruh tani dengan besarnya fluktuasi kebutuhan tenaga kerja.
- c. *Kelembagaan kredit informal*: yang berkembang di pedesaan sebagai akibat dari belum terjangkaunya pelayanan kredit dari lembaga formal oleh sebagian besar petani terutama petani kecil dan buruh tani. Bagi petani kecil tersedia tiga macam kredit nonformal:
- 1) Pemilik tanah bagi petani penyakap.
 - 2) Petani penggarap bagi buruh tani.
 - 3) Pelepas pinjaman pedesaan.

F. PERUBAHAN STRUKTUR PETANI DAN DISTRIBUSI

Perubahan struktur dan distribusi masyarakat petani paling tidak disebabkan karena perubahan 2 hal, yaitu teknologi dan struktur modal. Kedua hal ini telah mengakibatkan perubahan pada sistem kelembagaan, struktur tenaga kerja, distribusi pendapatan dan penguasaan tanah. Faktor pengaruh lain yang penting dalam perubahan struktur petani dan distribusi adalah perubahan struktur modal di pedesaan dengan masuknya sistem perkreditan dari lembaga keuangan di luar desa.

Perkembangan teknologi dan penambahan penduduk yang pesat ternyata menyebabkan perubahan-perubahan perekonomian di pedesaan, sehingga struktur pemilikan dan penguasaan sumber daya yang terbatas menjadi pincang. Hal ini mengakibatkan munculnya bentuk-bentuk perkreditan (KIK, KMKP, KCK) di samping bentuk-bentuk lain yang menyalurkan kredit-kredit sejenis, semakin banyak beroperasi dengan cara dan prosedur yang lebih mudah sehingga menarik bagi masyarakat peminjam tetapi terdapat hambatan yang disebabkan oleh kelembagaan pedesaan.

Kelembagaan pedesaan dapat berupa kelembagaan penguasaan tanah, kelembagaan hubungan kerja dan kelembagaan perkreditan. (1) Kelembagaan penguasaan tanah, yakni hubungan penguasaan tanah bervariasi dengan bervariasinya produktivitas. Pada keadaan produktivitasnya rendah, distribusi pemilikan tanah biasanya merata. (2) Kelembagaan hubungan kerja meliputi sistem pembagian hasil dan sistem sewa. (3) Kelembagaan kredit informal,

berkembang di pedesaan sebagai akibat dari belum terjangkaunya pelayanan kredit dari lembaga formal oleh sebagian besar petani terutama petani kecil dan buruh tani. Perubahan-perubahan kelembagaan yang terjadi dapat disebutkan sebagai berikut.

1. Penguasaan Tanah dan Kelembagaan (Gunawan Wiradi dan Magali)

Menurut Geertz, walaupun jumlah penduduk di Jawa semakin bertambah dan sumber daya semakin langka namun tidak seperti di negara-negara berkembang lainnya, masyarakat desa di Jawa tidak terkutub menjadi sekelompok tuan tanah dan sekelompok hamba tani karena adanya kebiasaan “berbagi” rezeki walaupun rezeki itu sendiri sudah berkurang.

Bentuk-bentuk penguasaan tanah secara adat yang terdapat di Pulau Jawa:

- a. *Tanah Yasan*: tanah yang diperoleh berkat usaha seorang membuka hutan atau “tanah liar” untuk dijadikan tanah garapan.
- b. *Tanah Gogolan*: yaitu tanah pertanian milik masyarakat desa yang hak pemanfaatnya biasanya dibagi-bagi kepada sejumlah petani (biasanya disebut “Penduduk Inti”) secara tetap atau berkala.
- c. *Tanah Titisara*: yaitu tanah pertanian (umumnya sawah) milik desa yang diperuntukkan bagi pamong desa terutama kepala desa sebagai gajinya selama menduduki jabatan itu.

Kelembagaan penguasaan tanah dan perubahannya:

- a. *Sistem gogolan*: ialah bentuk penguasaan tanah dengan status gogolan (nama setempat lain *hádala norowito*, *playangan*, *pekulen*, *kesikepan*). Dengan berlakunya UUPA, sebenarnya secara hukum status tanah gogolan tidak berlaku lagi, karena hak tanah atas tanah itu diberukan kepada penggarapnya yang terakhir, dengan status hak milik.
- b. *Sistem gadai*: menurut Iman Sudiyat ialah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. Atau bentuk lain pembayarannya dengan sekian kuintal gabah atau sekian gram emas atau seekor kerbau/sapi.
- c. *Sistem Sewa*: ialah penyerahan sementara hak penguasaan tanah kepada orang lain, sesuai dengan perjanjian yang dibuat bersama oleh pemilik

dan penyewa. (Istilah di Jawa: motong, kontrak, sewa tahunan, setoran, *oyodan* dan jual potongan).

- d. *Sistem Bagi Hasil*: ialah penyerahan sementara hak atas tanah kepada orang lain untuk diusahakan, dengan perjanjian si penggarap akan menanggung beban tenaga kerja seluruhnya dan menerima sebagian dari hasil tanahnya.

Kelembagaan hubungan kerja dan perubahannya:

- a. *Sistem pengupahan*: adalah hubungan kerja antara majikan dan penggarap dengan buruh, ditentukan sistem upah yang akan dipakai, besar dan bentuk upah, jam kerja, satuan kegiatan, upah per hari kerja dan upah persatuan kegiatan. Adapun cara pembayarannya dengan cara borongan dan harian didasarkan jumlah hari kerja.
- b. *Sistem Upah borongan*: jenis pekerjaan yang oleh petani diupahkan dengan sistem borongan ialah pekerjaan panen, mengolah tanah dan tanam. Sistem ini berubah yang semula mengolah dengan ternak hanya menggunakan sistem sambatan setelah pengolahan tanah dengan menggunakan traktor berlaku sistem upahan.
- c. *Sistem Upah Harian*: jenis pekerjaan yang diupahkan dengan sistem upah harian ialah mengolah tanah, tanam, menyiang dan memelihara tanaman. Semula pengupahan dengan sambatan berubah dengan upah nyata di samping uang juga mendapat jaminan makan.
- d. *Sistem Ceblokan /Kedokan* : semula sistem ini berkaitan dengan lembaga kerukunan desa. Seseorang yang panen wajib memberikan hasil panennya kepada tetangganya dengan mendapat imbalan tenaga. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan bertambahnya jumlah penduduk dan penguasaan tanah pertanian yang pincang, akan mengakibatkan berubahnya sistem ceblokan.
- e. *Sistem Sambatan, Tukar Tenaga dan Gotong-Royong*: ialah pertolongan seseorang yang berupa pekerjaan di sawah dalam usaha tani kepada orang lain atas permintaan (bukan diulir pekerjaan pertanian).

2. Penyerapan Tenaga Kerja Luar Sektor Pertanian di Pedesaan

Dari sebuah gambaran tentang masalah tenaga kerja di pedesaan, sering dikemukakan bahwa angka pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan berlimpahnya tenaga kerja, karena sektor pertanian tidak mampu menampung seluruh tambahan tenaga kerja. Tetapi beberapa laporan mengatakan bahwa

ada beberapa desa yang mengalami kekurangan tenaga kerja untuk mengolah kegiatan usaha tani. Namun kekurangan tenaga tersebut telah ditutup dengan masuknya teknologi kepedesaan tetapi tampaknya ada dua pendapat yang saling bertentangan mengenai masuknya traktor kepedesaan. Tentang meningkatnya masyarakat desa yang bekerja di luar sektor pertanian ada beberapa dugaan:

- a. Jenuhnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian.
- b. Terbukanya kesempatan kerja di luar sektor pertanian dengan pendapatan yang lebih baik.
- c. Terjadinya pergeseran nilai di desa.

G. POLA DISTRIBUSI MASYARAKAT INDUSTRI

1. Industri, Industrialisasi, dan Masyarakat Industri menurut Sudut Pandang Sosiologis

Dalam kehidupan keseharian di dalam masyarakat, sering kita dengar orang-orang menyebut kata-kata industri. Kalau kita telaah, mereka umumnya mengartikan istilah atau kata industri dengan menunjuk bukti-bukti fisik berupa bangunan-bangunan pabrik atau lokasi-lokasi yang di dalamnya penuh dengan pabrik-pabrik yang sedang beroperasi.

Pengertian tersebut memang tidak sepenuhnya salah namun, dalam sudut pandang Sosiologis, istilah atau konsep tentang industri di sini mempunyai pengertian yang lebih luas lagi. Menurut More, industri dapat disebut sebagai pabrifikasi bahan-bahan mentah menjadi komponen atau produk-produk jadi, terutama melalui sarana-sarana mekanik yang tergantung atau digerakkan oleh sejumlah sumber daya bukan manusia. Dengan demikian industri, menurut pendapat More, adalah suatu cara atau metode produksi yang di dalamnya di banyak dari perpaduan dari dua unsur, yaitu pabrifikasi (penerapan sistem pabrik) dan mekanisasi dengan menggunakan sumber daya (energi) bukan berasal dari manusia atau perpanjangan tangan tenaga manusia.



Sumber: www.bisnis.vivanews.com

Gambar 1.3
Mesin-mesin di Pabrik

Mesin-mesin dalam dunia industri menjadi perpanjangan tangan tenaga manusia dan atau menggantikan tenaga manusia dalam pengolahan bahan-bahan mentah menjadi produk jadi. Kata lain, Selain sistem pabrik, dalam industri pun mengandung unsur mekanisasi. Adanya mekanisasi ini berarti bahwa dalam industri, sarana-sarana produksi yang dipergunakan umumnya berbentuk mesin-mesin yang digerakkan oleh tenaga bahan bakar atau tenaga listrik atau sumber tenaga lainnya yang tidak berasal dari tenaga manusia atau hewan sebagaimana banyak dijumpai pada tahapan masyarakat sebelumnya.

Menurut para sosiolog, industrialisasi yang dijalankan oleh suatu masyarakat secara langsung atau tidak langsung akan memberi warna terhadap kebudayaan suatu masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, proses industrialisasi ternyata mempunyai kekuatan yang mampu mengubah bentuk suatu masyarakat secara keseluruhan, baik pada hubungan sosial, struktur sosial atau institusi sosial, dan norma atau nilai yang ada dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, dalam jangka panjang industrialisasi ternyata mampu menciptakan satu bentuk tatanan masyarakat baru yang mempunyai ciri-ciri yang khas dan sangat berbeda dengan bentuk-bentuk masyarakat sebelum ada atau diterapkannya industrialisasi.

2. Gambaran Umum Masyarakat Industri

Secara umum, terdapat perbedaan yang sangat besar antara karakteristik masyarakat industri dengan masyarakat sebelumnya atau masyarakat pertanian. Dari sisi demografis didapati bahwa laju pertumbuhan penduduk

pada masyarakat industri ternyata jauh lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk pada masyarakat pertanian. Hal ini terjadi karena angka tingkat kematian (*mortality rate*) pada masyarakat industri dapat ditekan seminimal mungkin sehingga terjadi penurunan yang sangat drastis. Tingkat harapan hidup masyarakat industri pun jauh lebih tinggi ketimbang tingkat harapan hidup pada masyarakat pertanian.

Salah satu hal terpenting yang juga dijumpai pada masyarakat industri adalah tingkat pendidikan pada masyarakat industri jauh melampaui tingkat pendidikan pada masyarakat pertanian. Dalam masyarakat pertanian, institusi pendidikan biasanya didukung oleh institusi keagamaan namun, pada masyarakat industri, institusi pendidikan tidak lagi didukung oleh institusi agama namun, langsung ditangani oleh komunitas guru atau dosen-dosen melalui institusi pendidikan.

3. Teknologi dan Pola Produksi pada Masyarakat Industri

Dengan semakin majunya teknologi dan ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh masyarakat industri maka sifat teknologi yang digunakan menjadi sangat berbeda dibandingkan dengan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat pertanian. Dari sisi teknologi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sifat teknologi yang digunakan oleh masyarakat industri sebagian besar tidak lagi tergantung atau berasal dari tenaga manusia atau tenaga hewan, melainkan telah digantikan oleh mesin-mesin yang digerakkan dengan tenaga mekanis.

Hal lain yang berkaitan erat dengan teknologi adalah bentuk energi yang digunakan pada teknologi tersebut. Bila pada masyarakat pertanian, manusia dan hewan merupakan sumber energi yang paling utama, sedangkan angin dan kayu merupakan sumber energi pengganti dari kepanjangan tangan usaha manusia atau binatang. Namun pada masyarakat industri pola tersebut telah berubah.

Adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat industri, terutama adanya revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi, telah mengubah secara radikal pola produksi masyarakat industri keseluruhan. Pada bidang ekonomi, khususnya dalam hal produksi, terdapat peningkatan produktivitas yang cukup tinggi. Ini ditandai dengan kemampuan masyarakat industri untuk memproduksi barang hingga melampaui kebutuhan dari anggota masyarakatnya. Karena surplus produksi yang mampu dihasilkan oleh masyarakat industri sangat tinggi, jauh di atas kebutuhan masyarakatnya maka surplus produksi tersebut biasanya diarahkan untuk kepentingan pasar

(komersial). Itulah sebabnya mengapa orientasi ekonomi dari pola produksi dalam masyarakat industri sekarang ini justru lebih ditujukan untuk kepentingan pasar (komersial).

4. Sistem Kepemilikan pada Masyarakat Industri

Pada umumnya, hampir semua masyarakat industri mempunyai kesamaan pola pada sistem kepemilikan yang mereka gunakan. Pada hampir semua masyarakat industri, terdapat pengakuan akan kepemilikan pribadi (*private ownership*) pada sistem kepemilikan yang mereka kembangkan. Di negara-negara sosialis maupun komunis kepemilikan pribadi tidak diakui terutama pada kepemilikan pribadi alat-alat produksi. Di negara-negara tersebut, masyarakat tidak diperbolehkan untuk memiliki alat-alat produksi namun, alat-alat produksi tersebut dikuasai secara kolektif oleh suatu lembaga kolektif, yaitu negara. Untuk masyarakat industri di negara-negara liberal, seperti AS, dan Inggris atau masyarakat industri yang lain, seperti Jepang, misalnya kepemilikan pribadi tidak dibatasi. Pada masyarakat ini, kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi diakui. Bahkan di negara liberal, seperti di Amerika Serikat, kepemilikan pribadi terhadap suatu alat-alat produksi penting, tidak dibatasi.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pola kepemilikan yang dikembangkan oleh masyarakat industri adalah diakuinya pola kepemilikan pribadi (*private ownership*), sedangkan yang membedakan antara masyarakat industri di negara satu dengan negara yang lain adalah pada hak atau derajat kepemilikannya. Ada negara-negara di mana hak kepemilikan tak dibatasi (tak terbatas), misalnya di negara-negara liberal dan ada pula hak kepemilikannya dibatasi, umumnya di negara-negara sosialis dan komunis.

5. Struktur Sosial Masyarakat Industri

Smelser melihat proses industrialisasi telah menyebabkan terjadinya proses diferensiasi struktural pada institusi/organisasi dalam masyarakat. Diferensiasi struktural adalah semakin berkembangnya unit-unit sosial tertentu dalam hal ini institusi-institusi sosial. Namun unit-unit tersebut semakin terspesialisasi dalam menjalankan fungsinya. Adanya diferensiasi struktural tersebut, menjadikan institusi/organisasi sosial yang ada dalam masyarakat industri berkembang ke arah yang semakin kompleks. Namun, fungsi atau peran dari institusi-institusi tersebut semakin terspesialisasi.

Salah satu hal yang penting dari pola stratifikasi dalam masyarakat industri adalah mekanisme mobilitas sosial (turun atau naik) di antara berbagai jenjang dalam lapisan sosialnya. Pandangan umum yang tersebar luas menyatakan bahwa pada masyarakat industri, mobilitas sosial seseorang tidak lagi tergantung dari faktor keturunan, tetapi melalui usaha yang mereka perjuangkan sendiri. Status yang diperoleh seseorang dalam masyarakat industri lebih merupakan *achived status*.

Coba Saudara perhatikan pada masyarakat di lingkungan sekitar Saudara tinggal. Bagaimana masyarakat memberikan penghargaan terhadap satu sama lain. Berdasarkan hal-hal apa saja mereka memberikan penilaian lebih tinggi status sosial seseorang terhadap yang lainnya.

Analisa yang Saudara kembangkan akan mempertajam pemahaman Saudara terhadap kelompok sosial di mana Saudara tinggal. Selamat Belajar dan semoga sukses.

6. Sistem Distribusi Masyarakat Industri

Pada masyarakat industri, mekanisme distribusi yang terjadi mengalami perubahan. Dengan semakin dominannya institusi ekonomi, terutama pasar, dalam aktivitas kehidupan masyarakat industri maka lanjut Shanahan dan Tuma, sebagian besar mekanisme proses distribusi dipindahkan melalui institusi pasar. Pasar di sini diartikan sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran barang atau jasa. Jadi mekanisme paling utama dari proses distribusi pada masyarakat industri berlangsung di pasar.

Para sosiolog melihat, proses distribusi pada masyarakat industri tidak semata-mata ditentukan oleh pasar, mekanisme permintaan dan penawaran. G. Lesnki menjelaskan bahwa proses distribusi yang berlangsung tidak terlepas dari kekuasaan negara. Menurut Lesnki, pada masyarakat industri, peran pemerintah sangat penting dalam proses distribusi. Bagaimanakah hal tersebut dapat terjadi? Ternyata, lanjut Lesnki, pasar sebagai mekanisme sistem distribusi, mempunyai kecenderungan untuk menghasilkan distorsi, karena adanya tarik menarik antar kepentingan-kepentingan, yang ada dalam masyarakat. Jadi pasar, lebih khusus lagi mekanisme permintaan dan penawaran, tidak berada dalam ruang hampa namun, pasar sebenarnya berada

dalam bingkai-bingkai kepentingan-kepentingan. Menurut Lesnki, salah satu organisasi sosial terpenting dalam kehidupan masyarakat yang mengatur segala kepentingan-kepentingan adalah negara. Karena itu, kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi mekanisme pasar umumnya dilakukan melalui negara.

Selain melalui negara, sistem distribusi yang melalui mekanisme pasar juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang tercipta dalam masyarakat. Pada pembahasan mengenai stratifikasi masyarakat industri, Lesnki menyinggung bahwa, industrialisasi telah mendorong sistem kelas okupasional dan sistem kelas pendidikan ke posisi yang semakin penting dalam proses perebutan/perjuangan kekuasaan dan hak istimewa dalam masyarakat industri. Dengan demikian, proses distribusi dalam masyarakat industri pun tidak terlepas dari pengaruh kedua sistem kelas tersebut. Namun, sekali lagi, Lesnki juga mengindikasikan hanya kelas-kelas tertentu saja yang terdapat dalam sistem kelas tersebut yang paling diuntungkan atau mendapat keuntungan dari sistem distribusi. Kelas-kelas tersebut adalah kelas pengusaha, kelas manajer, kelas fungsionaris partai, kelas militer, dan kelas profesional; termasuk kelas profesional dalam bidang pendidikan dan komunitas ilmiah. Jadi kelas-kelas inilah yang sebetulnya dapat mengambil manfaat dari sistem distribusi yang dikembangkan oleh masyarakat industri.

H. DISTRIBUSI MASYARAKAT POST-INDUSTRI : ISU GLOBALISASI DAN NEOLIBERALISME

Aktivitas ekonomi post industri, ditandai oleh perkembangan industri yang tidak saja berbasis pada *manufacture* dan pabrikasi. Masyarakat post industri ditandai dengan pergeseran dari pabrikasi barang-barang ke pelayanan (*Services*) dan perluasan pasar dunia serta perdagangan melalui transaksi kapital, khususnya berbentuk uang. Nilai transaksi yang sangat tinggi dilakukan melalui perdagangan maya dalam bentuk pasar bursa baik komoditi maupun nilai tukar uang atau *valas*. Produksi barang sebagian besar diarahkan pada barang-barang dengan dari bahan sintesis. James Petras (2001; 15-21) mengidentifikasi beberapa perubahan ke arah ekonomi yang kita sebut *post* industri ini dengan kondisi sebagai berikut.

1. Relokasi industri oleh perusahaan-perusahaan transnasional ke negara-negara dunia ketiga dalam rangka mendapatkan tenaga kerja murah, serta penguasaan pasar.

2. Internasionalisasi modal dalam bentuk-bentuk yang produktif (investasi untuk memperluas perdagangan dan produksi) dan bentuk-bentuk yang tidak produktif atau spekulatif.
3. Pembentukan dan pertumbuhan sebuah sistem produksi integral berdasarkan pembagian kerja internasional yang baru, operasi-operasi global dan strategi-strategi perusahaan-perusahaan transnasional, kerangka kebijakan yang mendukung dan teknologi baru.
4. Pembentukan tatanan dunia baru yang diwujudkan dengan tulang punggung IMF dan World Bank serta WTO, yang menentukan kerangka institusional bagi proses perkembangan kapitalisme dan perdagangan internasional yang bebas.

Konsepsi industri berbasis ekonomi global yang liberal dan tidak terbatas ini merupakan suatu bentuk neo liberalisme. Gerakan ini mengalir deras ke seluruh dunia dengan jargon globalisasi.

1. Globalisasi: Sebagai Strategi Ekonomi dan Ideologi

Sumbu asas dari globalisasi adalah perubahan tatanan Ekonomi. Intinya adalah penghapusan halangan ekonomi antara sebuah negara dengan negara lain sampai pada batas kewajaran. Bebas halangan ini ditujukan untuk kegiatan ekonomi di bidang perdagangan, keuangan dan investasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekonomi dunia pada skala yang paling kompetitif dan produktif. Bagi teori barat, perubahan ini dipercaya akan membawa kepada kemakmuran dan tahap kehidupan yang lebih tinggi (Martin Khor; 2002).

Dalam rangka menuju ke arah ini, tiga pilar institusi globalisasi, yaitu IMF, Bank Dunia, dan WTO, bekerja keras menyebarkan paham, infrastruktur, dan energi perubahan (berupa hutang dan bantuan teknis) ke seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pendorong utama bagi kelancaran pekerjaan ketiga lembaga tersebut adalah perubahan teknologi informatika (IT) dan komputer. Faktor lain yang penting turut menggairahkan semangat globalisasi ekonomi, adalah runtuhnya sistem Bretton Woods (1972) dan aktifnya penetapan nilai tukar mata uang secara mengambang sehingga membuka peluang untuk liberalisasi perdagangan uang. Hal ini membuat investasi asing bebas keluar masuk pasar uang dan melakukan investasi tidak langsung melalui bursa saham di negara manapun tanpa harus berkunjung ke negara yang dituju. Inilah yang disebut dengan pasar dunia

atau pasar bebas dan terbuka tanpa campur tangan negara (*stateless* atau *world market*).

Program P2KP yang dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia didahului dengan *survey* yang mendalam terhadap kondisi, budaya, nilai-nilai, pola hidup, peta sosial ekonomi dan politik masyarakat. *Survey* dilakukan sebelum bantuan direalisasikan. Bagaimana Saudara menganalisis fenomena tersebut dikaitkan dengan globalisasi sebagai strategi ekonomi dan ideologi!

2. Keuntungan-keuntungan Ekonomi dari Globalisasi dan Distribusinya

Telah banyak diketahui atau diakui bahwa perkembangan yang ditentukan oleh pasar atau pro-pasar yang terkait dengan globalisasi telah memperburuk ketidakadilan global yang ada atau yang baru muncul. Ketidakadilan sosial dalam hal distribusi sumber-sumber ekonomi atau produksi, dan pendapatan, tampak semakin lebar di berbagai tempat. Banyak studi tentang masalah-masalah ini mengambil pendekatan kritis terhadap kapitalisme neoliberal dan perkembangan global.

Masalahnya adalah bahwa ketidakpuasan sosial yang disebabkan oleh ketidakadilan-ketidakadilan tersebut bisa dimobilisir menjadi gerakan-gerakan oposisi dan resistansi, yang mendorong proses penyesuaian yang berpotensi mendestabilisasikan rezim-rezim politik yang membuat ketidakadilan-ketidakadilan tersebut.

3. Konsekuensi-konsekuensi Distributif dari Globalisasi

Pengaruh kelas-kelas globalis yang mendunia telah memicu terjadinya krisis sosial serius yang mempengaruhi buruh upahan, petani, pegawai dan wiraswastawan di seluruh dunia. Jika tingginya ketidakadilan pendapatan di antara kelas-kelas sosial merupakan sebuah konsekuensi dari pengaruh globalis, maka beberapa ketidakadilan lain menembus batas-batas nasional dan kultural. Pajak telah menjadi semakin regresif: pendapatan pajak pemerintah semakin banyak yang berasal dari kelompok-kelompok (buruh) upahan dan bergaji, sementara persentase pajak dari modal perusahaan multinasional terus mengalami penurunan. Hal ini sebagian disebabkan oleh

berbagai kebocoran yang absah dan kemampuan para pengacara pajak perusahaan untuk merencanakan tameng-tameng pajak dan menggeser lokus-lokus keuntungan ke negara-negara yang memungut pajak rendah (apa yang disebut *transfer pricing*). Paralel dengan sistem pajak regresif adalah subsidi-subsidi atau program-program pembelanjaan negara yang semakin regresif. Pemberian kemudahan kepada perusahaan dalam bentuk kredit berbunga rendah, insentif ekspor, subsidi untuk pembangunan pabrik, hibah tanah (*land grant*), pembangunan infrastruktur, penelitian dan pengembangan, serta lain-lainnya yang disertai dengan pemotongan secara besar-besaran terhadap transfer-transfer sosial (*social transfers*) sampai transfer-transfer upah dan gaji (*waged and salaried transfers*). Subsidi-subsidi negara untuk modal perusahaan multinasional bertambah, sedangkan jatah untuk buruh upahan, pensiunan, keluarga berpendapatan rendah, orang sakit dan terluka, keluarga dengan orang tua tunggal dan anak-anak justru menurun.

Mekanisme-mekanisme tertentu yang dengannya kelas-kelas kapitalisme menciptakan kontra-revolusi pendapatan dan kepemilikan mengalir melalui ideologi (neoliberal atau pasar bebas) dan paket-paket legislatif, seperti kebijakan-kebijakan penyesuaian struktural, privatisasi aset-aset negara yang menguntungkan, dan pembentukan statisme baru yang membiayai dan mengarahkan keseluruhan proses ini. Ideologi neoliberal merupakan wajah intelektual untuk proses meningginya ketidakadilan melalui beberapa rencana konseptual: ideologi ini menekankan individu sebagai unit analisis dasar dan konsep tanggung jawab individu dipakai untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi dan konsekuensi-konsekuensi sosial yang merugikan. Kekuasaan struktural kelas-kelas globalis merupakan penyebab sekaligus konsekuensi dari apa yang disebut "kebijakan-kebijakan penyesuaian struktural" yang telah diimplementasikan secara informal atau formal. Kebijakan-kebijakan penyesuaian struktural ini senyatanya merupakan proses "rekonsentrasi pendapatan" melalui pemotongan belanja-belanja sosial, pengurangan pajak perusahaan dan penambahan subsidi. Konsentrasi kekuasaan di tangan majikan dengan mengorbankan kaum pekerja upahan (yang dijuluki "fleksibilisasi buruh") menyebabkan rijiditas dalam hierarki pengaturan perusahaan. Para majikan secara **uni:meral** menetapkan aturan untuk menyewa, memecat, membatalkan kontrak, mensubkontrakkan dan cara-cara lain untuk memperbesar angka eksploitasi, menurunkan biaya buruh dan melipatgandakan keuntungan bagi usaha-usaha global.

Setelah Saudara mempelajari Kegiatan Belajar 2 di atas, coba menguji kemampuan diri Saudara dengan menjawab pertanyaan berikut.

1. Jelaskan perbedaan perspektif atau paradigma dalam Sosiologi dalam memandang dinamika masyarakat
2. Apakah perbedaan sistem distribusi masyarakat berburu, pertanian dan industri.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan masyarakat meramu dan berburu!
- 2) Bagaimanakah pola distribusi yang dikembangkan oleh masyarakat meramu dan berburu? Apabila hal tersebut dihubungkan dengan distribusi untuk hasil produksi, apakah pola distribusi yang dimaksud menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat? Jelaskan!
- 3) Jelaskan sistem produksi pada masyarakat hortikultura intensif dan hortikultura sederhana. Jelaskan pula perbedaan-perbedaan yang mendasar dari kedua sistem produksi tersebut!
- 4) Jelaskan sistem penguasaan tanah di Indonesia, khususnya Jawa, pada masa kerajaan dulu yang dikenal dengan sistem Apanage!
- 5) Apa yang dimaksud dengan revolusi teknologi dalam masyarakat industri? Jelaskan!
- 6) Jelaskan konsekuensi distribusi di dunia terhadap perkembangan liberalisme global!

Petunjuk Mengerjakan Latihan

- 1) Untuk dapat menjawab secara tepat pertanyaan-pertanyaan dalam latihan ini, pelajari dengan cermat materi dalam Kegiatan Belajar 2. Apabila Saudara masih belum merasa paham diskusikan dengan teman atau tutor Saudara.

- 2) Untuk memudahkan pemahaman Saudara, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, 2 dan 3 sebaiknya Saudara menyusun matriks perbandingan yang dikembangkan menjadi 3 kolom sebagaimana contoh berikut.

Perbedaan	Meramu	Masyarakat hortikultura
Struktur sosial
Pola produksi
Pola distribusi

- 3) Saudara harus menguasai struktur penguasaan tanah dalam bentuk apanage sehingga Saudara bisa menyelesaikan soal latihan nomor 4.
- 4) Untuk menjelaskan jawaban pada soal nomor 5, sebaiknya Saudara memperhatikan konsep-konsep seperti kemunculan teknologi dan pola produksi, *private ownership*, perubahan institusi, diferensiasi dan spesialisasi.
- 5) Agar jawaban Saudara terarah, dalam menjawab soal nomor 6 sebaiknya Saudara telah memahami benar tentang konsepsi liberalisme dan kapitalisme serta motif ekspansi kapitalisme di abad XXI.



RANGKUMAN

Perkembangan masyarakat didasarkan pada perspektif evolusioner mengenai sejarah perkembangan masyarakat manusia. Bentuk pertama masyarakat adalah masyarakat meramu dan berburu. Salah satu ciri yang terpentingnya yang berhubungan dengan pola distribusi sosial adalah terdapatnya mekanisme distribusi yang dikenal dengan konsep resiprositas (*reciprocity*). Terdapat dua jenis resiprositas, yakni *balanced reciprocity* dan *generalized reciprocity*.

Pada masyarakat hortikultura intensif, perkembangan tingkat spesialisasi peran atau fungsi institusi/organisasi sosial yang semakin meningkat terlihat dengan semakin banyak atau kompleksnya organisasi-organisasi sosial dan perkumpulan-perkumpulan yang ada. Sistem distribusi yang dikembangkan lebih condong didasarkan pada pola distribusi yang disebut sebagai redistribusi parsial atau redistribusi berstratifikasi.

Pola distribusi pada masyarakat pertanian adalah ekspropriasi surplus. Di sini pemilik tanah yang kuat memaksa para petani supaya menggarap tanah milik tuan tanah untuk memproduksi surplus ekonomi yang besar dan menyerahkannya kepada pemilik tanah. Eksploitasi ekonomi terjadi manakala satu pihak memaksa kepada pihak lain untuk memberikan sesuatu yang lebih besar sebagai ganti apa yang mereka terima.

Perubahan distribusi pertanian terus berkembang sampai sekarang karena masuknya teknologi baru dan redistribusi modal melalui sistem perkreditan. Kedua hal ini menyebabkan perubahan pada kelembagaan desa, menyangkut pola struktur pemilikan tanah, struktur tenaga kerja, struktur hubungan kerja dan distribusi pendapatan.

Masyarakat industri adalah masyarakat yang pola produksinya ditandai dengan pabrikasi bahan-bahan mentah menjadi komponen atau produk-produk jadi, terutama melalui sarana-sarana mekanik yang tergantung atau digerakkan oleh sejumlah sumber daya bukan manusia. Salah satu hal terpenting dari pola stratifikasi dalam masyarakat industri adalah mekanisme mobilitas sosial di antara berbagai jenjang dalam lapisan sosialnya. Status yang diperoleh seseorang dalam masyarakat industri lebih merupakan *achieved status*.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pola distribusi yang dikembangkan oleh masyarakat meramu dan berburu disebut
 - A. *generalized reciprocity*
 - B. redistribusi parsial
 - C. redistribusi murni
 - D. redistribusi tidak seimbang

- 2) Spesialisasi kelompok-kelompok pedagang/pengusaha dan militer mulai tumbuh pada masyarakat
 - A. meramu dan berburu
 - B. hortikultura sederhana
 - C. hortikultura intensif
 - D. pertanian

- 3) *Power, privilege* dan *prestige* merupakan konsep dari sosiolog yang bernama
 - A. Max Weber
 - B. Gerald Lesnki
 - C. Karl Marx
 - D. Emile Durkheim

- 4) Berikut ini yang dianggap oleh Sosiologi mempunyai peran penting dalam sistem distribusi tanah masyarakat pertanian di Indonesia (terutama Jawa) adalah
 - A. kredit perbankan
 - B. sistem warisan
 - C. jual beli di pedesaan
 - D. harga tanah

- 5) Masyarakat pertanian muncul pertama kali di daerah ...
 - A. Mesir dan Mesopotamia
 - B. Mesir dan Madagaskar
 - C. Cina dan India
 - D. Afrika Selatan dan Mesir

- 6) Salah satu ciri kehidupan sosial masyarakat industri adalah
 - A. bersenang-senang
 - B. sangat menghargai waktu
 - C. tidak disiplin
 - D. cinta keduniawian.

- 7) Ideologi yang kuat berpengaruh dalam era post-industri adalah
 - A. neoliberalisme atau pasar bebas
 - B. kemakmuran
 - C. pertumbuhan
 - D. persemakmuran.

- 8) Investasi asing bebas keluar masuk pasar uang dan melakukan investasi tidak langsung melalui bursa saham di negara manapun tanpa harus berkunjung ke negara yang dituju. Inilah yang disebut dengan
 - A. pasar dunia (*stateless* atau *world market*).
 - B. pasar global
 - C. globalisasi
 - D. kegagalan pasar

Untuk soal nomor 9-10 Pilihlah

- A. Jika (1) dan (2) benar
 - B. Jika (1) dan (3) benar
 - C. Jika (2) dan (3) benar
 - D. Jika (1), (2) dan (3) benar
- 9) Perubahan kelembagaan di desa pertanian terjadi dalam bentuk
- (1) Sistem bagi hasil ke sistem sewa
 - (2) Sistem penguasaan tanah pemilik penganggaran ke pemilik pengelola
 - (3) Sistem keluarga ke sambilan-sinambatan
- 10) Proses industrialisasi yang dijalankan ternyata telah memberi bentuk/warna terhadap kehidupan masyarakat, yaitu pada
- (1) Organisasi sosial
 - (2) Institusi sosial
 - (3) Tingkah laku masyarakat

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes formatif 1

- 1) C. Auguste Comte
- 2) D. Emile Durkheim.
- 3) A. Institusi Sosial.
- 4) A. Dinamis dari struktur masyarakat
- 5) A. Kondisi masyarakat.
- 6) A. Pertukaran dalam mencapai status dan prestise.
- 7) B. Kepentingan individu berbeda-beda sedangkan kepentingan masyarakat harus mengutamakan kepentingan seluruh/sebagian besar anggotanya
- 8) A. Adam Smith.
- 9) A. Lembaga ekonomi
- 10) C. Granovetter.

Tes formatif 2

- 1) A. *generalized reciprocity*
- 2) B. hortikultura sederhana
- 3) A. Max Weber
- 4) B. sistem warisan
- 5) A. Mesir dan Mesopotamia
- 6) B. Sudah jelas (lihat dalam teks)
- 7) A. Neoliberalisme atau pasar bebas.
- 8) A. Pasar dunia (*stateless* atau *world market*)
- 9) D. Semua benar
- 10) D. Semua benar.

Glosarium

Dinamika sosial	Keseluruhan perubahan dari seluruh komponen masyarakat dari waktu ke waktu.
Jaringan sosial	jaringan orang-orang dan kemampuan interaksinya dengan struktur sosial yang mendukungnya.
Ketertambatan	Perilaku ekonomi tertambat pada jaringan-jaringan hubungan interpersonal.
Kelembagaan	Sebagai suatu perangkat aturan yang mengatur atau mengikat dan dipatuhi oleh masyarakat.
Kolektivitas	Sebuah bentuk gotong-royong yang menghasilkan banyak nilai tambah dalam kehidupan bermasyarakat, sebuah bentuk kerja kolektif (sama) yang manusiawi.
Konstruksi sosial	Menerangkan pengertian lembaga sebagai hasil pembentukan sosial secara perlahan (<i>a slow social creation</i>), berupa sistem gagasan dan perilaku yang terorganisasi yang ikut dalam perilaku itu.
Lembaga sosial	Lembaga yang mempunyai fungsi mengatur, mengarahkan atau memberi konteks bagi tindakan individu di dalam kehidupan bersama kelompok atau masyarakat.
Mobilitas sosial	Gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain; perubahan, pergeseran, peningkatan, ataupun penurunan status dan peran anggotanya.
<i>Path dependent</i>	Menerangkan bahwa lembaga-lembaga yang terbangun tidak dapat terlepas dari keterkaitan (dan pengaruh) dari (lingkungan) lembaga lain di sekitarnya yang sudah ada terlebih dahulu.
<i>Power</i>	kemungkinan (<i>probability</i>) dari orang-orang atau sekelompok orang untuk mewujudkan kehendaknya dalam suatu tindakan komunal, di mana kehendak itu bertentangan dengan partisipan lain, dalam konteks tatanan politik
<i>Prestige</i>	Keistimewaan, hak-hak yang lebih yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dibandingkan mereka yang tidak memiliki kekuasaan.
<i>Privilege</i>	Kehormatan, sebagai dampak tidak langsung dari adanya kekuasaan dan keistimewaan sehingga seseorang atau sekelompok orang lebih dihormati

	daripada yang lain.
Realitas sosial	Suatu peristiwa yang benar-benar terjadi di tengah masyarakat.
Sosiologi	Ilmu yang mempelajari tentang statika sosial dan dinamika sosial.
Statika sosial	Kajian terhadap tatanan sosial.
Struktur sosial	Tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat, di dalam struktur sosial tersebut terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan yang menunjuk pada suatu keteraturan perilaku.
Sosiologi Ekonomi	Studi mengenai bagaimana cara individu atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya terhadap jasa dan barang langka dengan menggunakan pendekatan Sosiologi.
Sosiologi Distribusi	Studi mengenai proses alokasi barang yang bernilai langka dalam masyarakat; menitikberatkan perhatian pada aspek dinamis dalam masalah struktur masyarakat, misalnya kekuasaan, penghargaan sosial atau kepemilikan sosial.

Daftar Pustaka

- Broomley, Daniel W. 1989. *Economic Interest and Institution: The Conceptual Foundation of Public Policy*. Basil Blacwell, New York.
- Calvin, Goldscheider (ed). 1992. *Migration, Population Structure, and Redistribution Policies*. San Francisco: WestView Press.
- Damsar. 1997. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Feibleman, James K. 1968. *The Institution of Society*. Newyork: Humanities Press, p. 245-261.
- Feibleman, James. 1968. *The Institution of Society*. New York: Humanities Press.
- Gerhard, Lesnki. E.. 1984. *Power and Privilege: A Theory of Social Stratification*. Chapel Hill and London: University of North Carolina Press.
- Gibson, Burrell and Morgan Gareth. 1985. *Sociological Paradigms and Organisational Analysis*. New Hampshire: Heinemann Postmouth.
- Granovetter, Granovetter and Swedberg R. 1992. *The Sociology of Economic Life*. San Francisco: Westview Press.
- Horton, Cooley Charles. 1966. *Social Process*. Carbondale: Southern Illinois University Press.
- James, Henslin M. 1998. *Essentials of Sociology: A Down to Earth Approach*. Massachussets: Allyn and Bacon.
- Marc, Tool R. 1988. *Evolutionary Economics: Foundation of Institutional Thought*. Vol I. New York: ME Sharpe Inc.
- Mark, Granovetter. 1974. *Getting A Job: A Study of Contact and Careers*, Cambridge: Harvard University Press.

- Mark, Granovetter. 1985. "*Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness*", *Journal of Sociology* no. 91, University of Chicago, November 1985.
- Max, Weber. 1968. *Economy and Society part I*. New York: Bedminster Press.
- Richard, Swedberg. 1990. *Economics and Sociology: Redefining Their Boundaries*. New Jersey: Princeton University Press.
- Sharon, Zukin and Dimaggio Paul. 1990. *Structures of Capital: The Social Organization of The Economy*. New York: Cambridge University Press.
- Smelser, N.J and Swedberg. 1994. *Handbook of Economic Sociology*. New York: Princeton University Press.
- Stinchcombe, Arthur L. 1983. *Economic Sociology*. New York: Academic Press Inc.
- Wolfgang, Streeck. 1992. *Social Institution and Economic Performance*. London: Sage Publication.